

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DASAR



**KONSTRUKSI POSISI PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BAGELEN :
SUDUT PANDANG BUDAYA, AGAMA DAN POLITIK**

Tahun ke-2 dari Rencana 2 Tahun

Tim Peneliti:

Dr. Sofa Marwah, S.IP. M.Si

NIDN : 0026047504

Dr. Soetji Lestari, M.Si

NIDN : 0023056211

Dra. Tri Rini Widyastuti, M.Si

NIDN : 0029046304

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : KONSTRUKSI POSISI PEREMPUAN DALAM
MASYARAKAT BAGELEN : SUDUT PANDANG
BUDAYA, AGAMA DAN POLITIK

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr SOFA MARWAH, S.IP, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman
NIDN : 0026047504
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Politik
Nomor HP : 08161678309
Alamat surel (e-mail) : sofamarwah75@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr. Dra SOETJI LESTARI M.Si
NIDN : 0023056211
Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman

Anggota (2)
Nama Lengkap : Dra TRI RINI WIDYASTUTI M.Si
NIDN : 0029046304
Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman

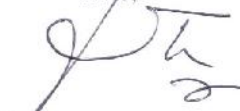
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 82,240,000
Biaya Keseluruhan : Rp 219,740,000

Mengetahui,
Dekan FISIP Universitas Jenderal Soedirman



(Dr. Jarot Santoso, M.S)
NIP/NIK 195710291986011001

Purwokerto, 8 - 11 - 2019
Ketua,



(Dr SOFA MARWAH, S.IP, M.Si)
NIP/NIK 197504262003122001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman



(Prof. Dr. Rida Naufal, SP.M.Si)
NIP/NIK 197011211995122001

RINGKASAN

Simbol perempuan Bagelen yaitu Nyai Bagelen merupakan perempuan Jawa pinggiran, bukan perempuan dari kalangan pusat kekuasaan, namun berkontribusi penting sebagai penjaga tradisi, pemimpin, pemelihara dinasti, penjunjung agama, dan mampu mengelola industri dan pertanian. Ketokohan perempuan tersebut seiring perjalanan waktu tergerus oleh bias gender. Demikian pula kontribusi perempuan dalam menjaga tari dolalak dan mendengarkan syiar agama melalui seni tradisional, sangat jarang diakui oleh publik sebagai kontribusi perempuan dalam menjaga tradisi dan menjunjung tinggi agama seiring berlakunya ideologi kekuasaan yang mengutamakan peran laki-laki. Oleh karena itu perlu perumusan teoritis yang jelas dalam melihat posisi dan kontribusi perempuan yang sesungguhnya dalam tradisi masyarakat pinggiran.

Metode penelitian yaitu metode kualitatif (Newman, 1994 : 4) agar dapat mengkonstruksikan realitas sosial dan makna budaya terkait peran perempuan dalam masyarakat Bagelen di Kabupaten Purworejo dan Kebumen, didukung konstruksi teoretik berdasarkan naskah-naskah terkait Bagelen, seperti babad, legenda, serta dokumen sejarah dan budaya lainnya. Mengacu pada Suseno (1984: 4), konstruksi teoretik dalam ilmu pengetahuan modern dibangun atas dasar kepastian intuitif untuk mencapai kejelasan logis. Informan penelitian dipilih secara *snowball sampling* (Harrison, 2007: 25) yaitu tokoh sejarah dan budaya Bagelen; tokoh perempuan di wilayah Bagelen; pelaku seni dan budaya; serta akademisi pemerhati sejarah, budaya, dan agama. Data dikumpulkan menggunakan kombinasi antara wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Analisis dilakukan secara simultan sepanjang proses penelitian untuk mencapai kesimpulan mendasar sebagai jawaban penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu untuk mengembangkan kajian studi yang menginterpretasikan ulang tentang posisi dan kontribusi perempuan yang sesungguhnya. Dalam konteks budaya Bagelen, tokoh perempuan masih dikonstruksikan sebagai perempuan sakti dan bertuah saja, namun bukan sebagai perempuan pemimpin yang mampu menginspirasi perempuan pada masa sekarang. Penulisan sejarah tergantung pada siapa yang menulis atau bertutur, dengan sudut pandang laki-laki atau siapa yang berkuasa pada satu waktu tertentu.

Selain itu penulisan narasi tentang sejarah perjalanan masyarakat perlu dikembangkan dari sudut yang lebih luas, atau secara sistem keseluruhan perlu ditonjolkan. Hal tersebut mendorong identifikasi pada siapapun yang ada pada situasi akan nampak. Sialnya memang, seringkali yang terlihat adalah laki-laki dengan ketokohan ataupun peran tertentu, dan bagi perempuan, seolah tidak pernah hadir menyumbangkan banyak hal penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kelahiran tari dolalak misalnya, para penemu tersebut adalah serdadu (baca laki-laki) yang sedang istirahat pada masa penjajahan Belanda. Bahwa perempuan ikut berkontribusi hadir di sana, penuturan sejarah tidak melihat itu. Bahkan ketika saat ini dolalak berkembang karena diperankan oleh perempuan, maka sudut melihatnya sebatas penari perempuan menjadikan tarian lebih meriah. Kebijakan pemerintah daerah pun belum berpihak pada peningkatan kualitas hidup para pelaku seni setempat. Ahimsa Putra menegaskan perlunya studi yang mengembangkan cara pandang utuh, berimbang, mengamengikutsertakan sistem dan konteksnya, tidak untuk menenggelamkan suatu tokoh, namun ingin mendeskripsikan lingkungan, konteks, dan sistem yang ada disekelilingnya.

Kata kunci : *perempuan, Bagelen, seni, budaya*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
3.1 Tujuan Penelitian.....	6
3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	7
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	10
5.1 Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan Bagelen oleh Pemerintah Daerah.....	10
5.2 Kontribusi Perempuan dalam Perkembangan Masyarakat Bagelen.....	21
5.3 Representasi Perempuan Bageen dalam Seni dan Budaya.....	30
5.4 Luaran yang Dicapai.....	39
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alir Penelitian.....	9
Gambar 2.	Penugasan Tim Peneliti	9
Gambar 3.	Gedung Kesenian Sarwo Edhi Kabupaten Purworejo.....	13
Gambar 4.	Museum Tosan Aji Kabupaten Purworejo.....	13
Gambar 5.	Festival Bumi Kayu Arahiwang.....	15
Gambar 6.	Festival Sawunggalih Art	15
Gambar 7.	Romansa Purworejo.....	18
Gambar 8.	Pagelaran Dolalak di Kabupaten Purworejo.....	33

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi Pangastoeti (2009) menunjukkan perempuan terpinggirkan dalam sejarah manusia akibat subjektivitas dalam penulisan sejarah yang didominasi laki-laki; sementara perempuan dianggap tidak memiliki kontribusi penting dalam perkembangan masyarakat. Studi tersebut relevan dengan hasil penelitian ini pada tahun pertama, yaitu Penelitian Berbasis Kompetensi, yang menunjukkan bahwa dalam perjalanan sebuah masyarakat, perempuan menjadi tokoh yang terlupakan, yaitu kelompok masyarakat Bagelen, yang meliputi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

Kebudayaan Bagelen merupakan budaya peralihan antara kebudayaan Jawa di sebelah timur dan Banyumas di sebelah barat. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bahasa yang merupakan campuran bahasa Jawa dan Banyumas. Dalam sejarah Bagelen, terdapat tokoh perempuan yaitu Nyai Bagelen yang digambarkan sebagai pemimpin dan petani yang ulet. Dia juga beternak dan menenun, sambil mengurus rumah tangga. Penyebutan “Nyai Bagelen” dengan namanya sendiri juga menunjukkan pengakuan kultural terhadap kedudukan penting kaum perempuan. Identitas tersebut dikonstruksikan dalam konteks laki-laki dan perempuan melalui nama seseorang (Woodward, 1999: 2). Identitas perempuan Nyai Bagelen sebagai dirinya sendiri diakui oleh masyarakat.

Namun seiring perjalanan waktu, ketokohan Nyai Bagelen direduksi pada persoalan bias gender. Ketika masyarakat menjadi sumber pengetahuan (Irwan Abdullah, 2018) maka reproduksi pengetahuan berhadapan dengan ideologi yang lebih mengutamakan laki-laki, sehingga kebesaran tokoh perempuan bisa lekang oleh waktu. Abdullah (2018) menyatakan ketokohan Nyai Bagelen mengalami *in appropriase*, di mana faktor *female leadership* menjadi

tidak tampak, sehingga figur Nyai Bagelen lebih banyak disimbolisasi dengan hal-hal yang bersifat mitos belaka. Hingga kini, ingatan publik itu tentang Nyai Bagelen hanya sebatas tokoh masa lalu yang lekat dengan kesaktian dan bertuah. Padahal sosok Nyai Bagelen seharusnya juga ditampilkan sebagai perempuan pemimpin, penjaga tradisi, mengurus pertanian, peternakan, tenun, yang mampu menginspirasi banyak penduduk Bagelen.

Kontribusi perempuan Bagelen juga bisa dilihat melalui kesenian tradisional. Studi yang dilakukan oleh Santoso (2013) menunjukkan perempuan memiliki peran sentral dalam mengangkat seni tradisi *dolalak*. Studi tersebut merupakan upaya untuk menunjukkan perempuan juga mengisi ruang *public knowledge* (Abdullah, 2018). Hanya karena realitas sejarah selama penjajahan (dalam hal ini penjajahan kolonial Belanda) memperlihatkan dominasi laki-laki, maka kontribusi perempuan tidak tampak, apalagi bagi perempuan di daerah pinggiran. Dalam ranah ilmu pengetahuan, studi mengenai posisi perempuan dari perspektif budaya lokal masih kurang, karena peran perempuan masih banyak dilihat menggunakan kacamata kekuasaan, patriarkhi dan modernitas Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Terkait keberadaan Nyi Bagelen sebagai tokoh lokal pada masa lalu di wilayah Bagelen, penelitian ini diarahkan untuk melihat kebijakan pengelolaan kebudayaan lokal, sejauh manakah memberi pengakuan khusus terhadap peran penting perempuan. Penekanan ini penting mengingat keberadaan Nyi Bagelen lebih banyak diingat sebagai tokoh yang sakti dan bertuah, bukan sebagai pemimpin perempuan yang tangguh dan menginspirasi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan pada posisi perempuan lokal yang direpresentasikan melalui seni dan budaya yang disimbolisasi melalui tarian *dolalak*, sebagai tarian khas masyarakat Bagelen, terutama di wilayah Kabupaten Purworejo.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tersusunnya kajian mengenai posisi perempuan dalam perspektif budaya lokal beserta argumen teoritis yang dibangun akan melengkapi kajian-kajian yang fokus pada konfigurasi lokal mengenai peran dan kedudukan perempuan dalam keragaman adat dan istiadat di Indonesia. Kajian tersebut akan menjadi referensi pembandingan hasil-hasil kajian yang selama ini menjadi arus utama, di mana peran dan kedudukan kaum perempuan selalu dibaca dalam pandangan modernitas dengan menggunakan budaya patriarkhi sebagai kerangka utama analisis.

Ilmu pengetahuan senantiasa ditempatkan sebagai ilmu universal yang bebas nilai dan objektif. Pengetahuan yang demikian berakar pada budaya Barat dan bersifat patriarkhis. Pengetahuan yang bersifat reduksionis tersebut menasbihkan bahwa produksi pengetahuan adalah budaya Barat yang menghendaki keseragaman dalam pendekatan. Reduksionisme ini meminggirkan kemampuan kaum perempuan karena dominasi yang ditebarkannya. Dalam hal ini Vandana Shiva (1997) menyatakan perlunya pengetahuan berlandaskan *women ways of knowing* atau cara produksi pengetahuan yang berdasar prinsip feminitas. Shiva sedang menempatkan kaum perempuan yang pada awalnya sebagai objek utama perubahan, justru sebagai pusat proses perubahan serta penciptaan pengetahuan.

Dengan demikian konfigurasi perempuan dalam adat istiadat dan budaya lokal mencerminkan upaya yang menempatkan kaum perempuan sebagai pusat memahami bangunan kebudayaan secara utuh. Kebudayaan bagi suatu masyarakat bukan hanya menjadi *frame of reference* yang menjadi pedoman tingkah laku dalam berbagai praktik sosial, tetapi juga menjadi materi yang berguna dalam proses identifikasi diri dan kelompok. Kebudayaan merupakan serangkaian nilai yang telah disepakati dan yang mengatur agar sesuatu yang bersifat ideal dapat diwujudkan (Irwan Abdullah, 2009). Dalam hal ini Koentjaraningrat (1985) menyatakan

kebudayaan mempunyai paling sedikitnya tiga wujud. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai hasil karya manusia.

Namun demikian, sampai saat ini budaya patriarkhi masih menjadi cara pandang utama untuk memahami posisi perempuan. Patriarkhi merupakan sistem dari struktur sosial dan praktek-praktek dalam dominasi, tekanan, serta eksploitasi terhadap perempuan. Sylvia Walby (Jane Philcher & Imelda Whelehan, 2004) menekankan enam struktur patriarkhi, yaitu; yaitu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan upahan, negara, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas dan budaya. Padahal terdapat sejumlah kritik umum terhadap interpretasi relasi gender yang menggunakan konsep patriarkhi, yaitu 1) interpretasi demikian gagal mengakui atau melaporkan variasi sejarah dalam relasi gender; 2) teori-teori yang mana patriarkhi merupakan konsep utama dikritik sebagai reduksionisme; 3) patriarkhi kurang mendorong perkembangan relasi gender; 4) secara teori penggunaan konsep patriarkhi telah dikritik untuk kecenderungan universalisme, yang berarti gagal untuk mengakui variasi kultural; 5) teori yang menggunakan konsep patriarkhi telah dikritik untuk strukturalisme yang abstrak.

Dalam ranah ilmu pengetahuan, kajian posisi perempuan dalam bidang sosial-politik, agama dan budaya lokal menjadi kajian yang menempatkan posisi kaum perempuan sebagai pemegang peran yang sesungguhnya sama-sama penting dengan laki laki. Saat ini, kajian mengenai posisi perempuan dari perspektif budaya lokal masih kurang, karena peran perempuan masih banyak dilihat menggunakan kacamata modernitas Barat. Kajian ini memperkuat bukti empirik bahwa sesungguhnya banyak perempuan dalam sejarah kekuasaan dan budaya lokal mampu mengambil peran penting dalam menorehkan sejarah sekaligus melestarikan adat istiadat

dan budaya lokal dalam masyarakat. Dalam upaya pelestarian adat istiadat dan budaya, nilai-nilai feminisme yang melekat pada perempuan diperlukan untuk menjaga keseimbangan peradaban yang berpijak pada lokalitas sehingga tidak secara terus menerus dan holistik terbawa oleh arus perubahan modernitas Barat.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

1. Menyusun laporan penelitian berupa studi lengkap mengenai posisi *indigenous* perempuan dalam perkembangan sosial-politik, agama dan budaya lokal, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang posisi dan kontribusi perempuan yang sesungguhnya dalam perjalanan sebuah masyarakat
2. Mengikuti seminar internasional dalam negeri
3. Menyusun publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.
4. Menyusun buku monograf mengenai kajian gender, politik dan kebudayaan, dengan judul *Perempuan dan Kekuasaan dalam Tradisi Jawa Pinggiran*

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dalam tataran ilmu pengetahuan, untuk menegaskan bahwa posisi perempuan dalam bidang sosial-politik, agama dan budaya lokal menjadi kajian yang menempatkan posisi kaum perempuan sebagai pemegang peran yang sesungguhnya sama-sama penting dengan laki laki. Saat ini, kajian mengenai posisi perempuan dari perspektif budaya lokal masih kurang, karena peran perempuan masih banyak dilihat menggunakan kacamata modernitas Barat. Kajian ini memperkuat bukti empirik bahwa sesungguhnya banyak perempuan dalam sejarah kekuasaan dan budaya lokal mampu mengambil peran penting dalam menorehkan sejarah sekaligus melestarikan adat istiadat dan budaya lokal dalam masyarakat. Dalam upaya pelestarian adat istiadat dan budaya, nilai-nilai feminisme yang melekat pada perempuan diperlukan untuk menjaga keseimbangan peradaban yang berpijak pada lokalitas.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memberikan detail-detail fenomena rumit yang sulit diungkap dengan metode kuantitatif (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 1990). Peneliti juga menggunakan konstruksi teoritis berdasarkan naskah-naskah yang terkait Bagelen, seperti *babad*, *historiografi*, *legenda* dan dokumen sejarah dan budaya lainnya. Konstruksi teoritis mengadopsi dari Franz Magnis Suseno (1984) bahwa konstruksi teoritis dalam ilmu pengetahuan modern adalah suatu skema/struktur/gambar yang dibangun atas dasar kepastian intuitif untuk mencapai kejelasan logis.

Teknik pengumpulan data dengan kombinasi wawancara (*interviewing*), studi dokumen (*reading*), dan observasi (*watching*). Adapun penetapan informan menggunakan teknik *snowball sampling* (Lisa Harrison, 2007), yaitu :1) Tokoh sejarah dan budaya Bagelen dari Purworejo dan Kebumen; 2) Tokoh perempuan di wilayah Bagelen (Purworejo dan Kebumen); 3) Pelaku seni dan budaya (laki-laki dan perempuan) Purworejo dan Kebumen; 4) Akademisi pemerhati sejarah, budaya, agama dari UGM Yogyakarta.

Pengolahan dan analisis data dilakukan setiap waktu ketika pengumpulan data secara berkelanjutan. Diawali proses klasifikasi data agar menjaga konsistensi, dilanjutkan langkah abstraksi teoritis terhadap informasi dan fakta di lapangan, yang menghasilkan pernyataan-pernyataan mendasar. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan penelitian dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

Bagan Alir Penelitian

Tahun Kedua :

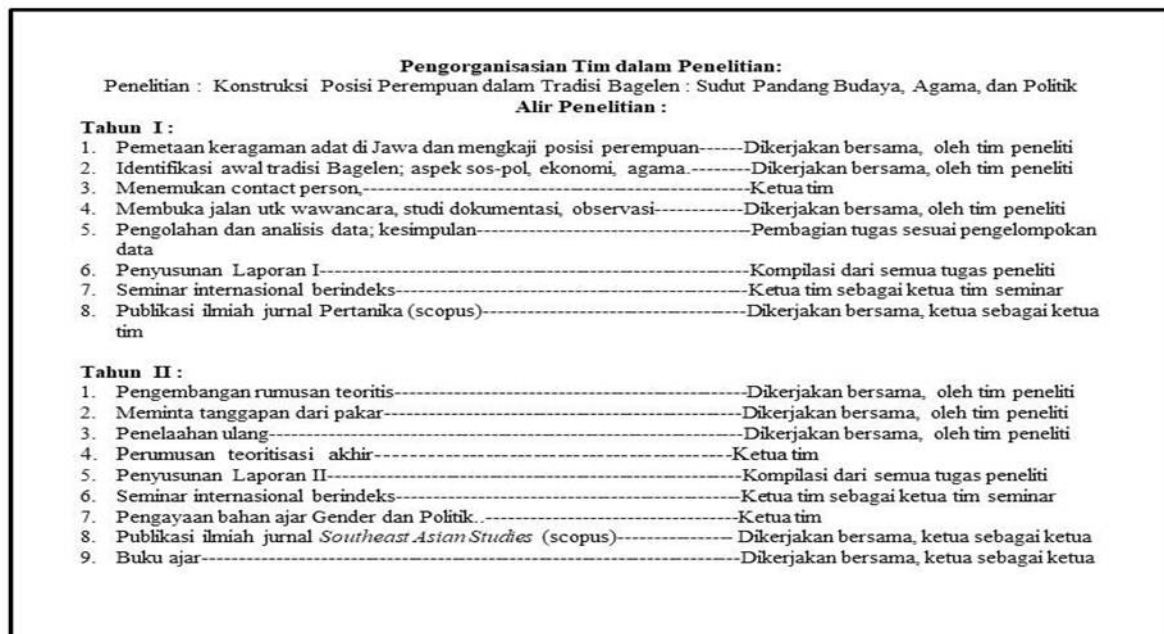
1. Tim peneliti mengembangkan rumusan teoritis baru terkait posisi *indigenous* perempuan dalam perkembangan sosial-politik, agama dan budaya lokal.
2. Peneliti melakukan wawancara dengan para pakar (bidang perempuan, politik, agama, budaya) untuk meminta tanggapan hasil rumusan teoritisasi baru terkait posisi perempuan dan budaya lokal yang dikembangkan oleh peneliti.
3. Peneliti melakukan penelaahan ulang rumusan sesuai dengan tanggapan dan masukan dari para informan.
4. Merumuskan hasil kajian mengenai cara pandang budaya lokal (Bagelen) dalam menempatkan peran dan kedudukan kaum perempuan.
5. Tim peneliti menyusun Laporan Penelitian Tahun II.
6. Mengikuti seminar internasional dalam negeri.
7. Menyusun publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi
8. Buku monograf mengenai gender, politik dan kebudayaan

Alir Penelitian



Gambar 1. Alir Penelitian

Penugasan Tim Peneliti



Gambar 2. Penugasan Tim Peneliti

BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan Bagelen oleh Pemerintah Daerah

Sepanjang Orde Baru berkuasa, kebudayaan Jawa mendominasi fokus utama studi para ahli. Studi fenomenal dari Anderson (1991) dan Pamberton (2003) misalnya, mengungkap refleksi kekuasaan Orde Baru yang mempraktikkan tradisi kekuasaan Jawa. Kebudayaan Jawa yang dimaksudkan merujuk pada pusat kebudayaan Jawa, yaitu Keraton Solo dan Yogyakarta. Ketika kekuasaan Orde Baru jatuh, terjadi pergeseran dari dominasi budaya Jawa menjadi bangkitnya isu kedaerahan. Dalam hal fokus utama studi para ahli, juga cenderung terjadi pergeseran, di mana studi mengenai kebudayaan daerah mulai banyak mendapat perhatian. Studi Hanneman dan Nordholt (2004 : 2) mencatat bahwa kebangkitan politik identitas yang berbasis kedaerahan, kelompok perempuan, agama, etnis, lebih menonjol di era reformasi, yang ditandai dengan tuntutan kelompok, perda *syariah*, perda yang bersendi adat, gerakan fundamentalisme agama, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, studi Jones (2015 : 317) menunjukkan bahwa hal yang paling penting dalam era reformasi adalah berkembangnya politik identitas etnik dan inisiatif bagi kebijakan budaya dalam kerangka kebijakan desentralisasi.

Mengacu pada hasil studi Jones (2015) tersebut, selanjutnya akan dikaji mengenai inisiasi kebijakan kebudayaan daerah, apakah kehadiran negara untuk merawat kebudayaan Jawa pinggiran sudah mengikutsertakan kontribusi kaum perempuan. Kebudayaan Jawa pinggiran yang dimaksudkan adalah salah satu variasi budaya Jawa yaitu kebudayaan Bagelen. (Koentjaraningrat, 1984). Masyarakat luas mungkin tidak mengenal kebudayaan Bagelen, meskipun letaknya tidak jauh dari pusat kebudayaan Jawa. Hal tersebut dapat dimaklumi karena masyarakat Bagelen tidak menjadi fokus utama studi dari para ahli. Oleh karena itu, ketika kebijakan desentralisasi berkembang, menjadi penting untuk mengkaji situasi sosial

kultural masyarakat di wilayah pinggiran, seperti masyarakat Bagelen, yang sebelumnya tidak banyak mendapat perhatian dari para ahli.

Dalam konteks kebijakan desentralisasi, komitmen pemerintah daerah untuk merawat kebudayaan daerah melalui kebijakan sangat penting. Pemerintah adalah pihak yang mendanai pengelolaan dan pengembangan kebudayaan. Untuk itu, urusan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan negara. Studi dari Silva, et al (2013) menunjukkan bahwa peran dari pemerintah daerah dan kebudayaan daerah menjadi dua arus yang tidak bisa dipisahkan. Namun apakah peran pemerintah daerah tersebut sudah memberikan memberi pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam menjaga adat dan istiadat atau kebijakan pengembangan kebudayaan yang berlaku masih bersifat netral, bagian ini bermaksud untuk menjawabnya

Makna kebudayaan dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang melibatkan banyak aktor, dengan serangkaian nilai dan kepentingan para aktor yang memiliki tingkat kekuasaan berbeda-beda (Abdullah, 2009 : 2). Dalam hal ini kita bisa memahami mengenai kuatnya representasi kebudayaan Jawa dalam praktik kekuasaan Orde Baru seperti kajian banyak ahli seperti Anderson (1991), Pamberton (2003), dan Jones (2015). Artinya, pemaknaan kebudayaan saat itu didukung oleh begitu banyak aktor dari berbagai hierarki dengan membawa nilai dan kepentingan yang sama, terkait dominasi kebudayaan Jawa dan memiliki tujuan sama yaitu penguatan rezim.

Salah satu media untuk menanamkan dominasi tersebut, melalui Kementrian Kebudayaan yang sepanjang kekuasaan Orde Baru, digabung dengan urusan pendidikan, menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika reformasi berlangsung, urusan pendidikan dan kebudayaan dipisahkan. Bidang kebudayaan kemudian disatukan dengan pariwisata. Namun belakangan, urusan kepariwisataan dinaungi tersendiri oleh Kementrian Pariwisata. Adapun urusan

kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar sampai menengah. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian dari Schlehe (2011) yang menunjukkan bahwa ketika reformasi berlangsung di Indonesia, terdapat kebutuhan untuk memahami kembali mengenai kebijakan pengelolaan dan pengembangan keragaman kebudayaan etnis.

Seiring kebijakan desentralisasi, pengelolaan kebudayaan oleh negara bersifat variatif berdasarkan kebutuhan lokal kedaerahan. Studi Robinson (2018) melihat pengelolaan kebudayaan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk “municipalisation of culture”, di mana pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengelola kebudayaan termasuk juga dalam pendanaan. Di Kabupaten Purworejo yang menjadi lokasi penelitian ini, hingga saat ini, urusan kebudayaan disatukan dengan urusan pariwisata. Mengacu pada Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, sesuai dengan kewenangan daerah mencakup kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi pula, pergeseran pengelolaan kebudayaan juga diikuti oleh peran pengelolaan kebudayaan oleh dewan kesenian daerah, museum daerah, ataupun taman budaya. Saat ini Kabupaten Purworejo sudah memiliki Dewan Kesenian Purworejo (DKP) dan mempunyai Gedung Kesenian Sarwo Edhie Wibowo. Adapun museum daerah di Kabupaten Purworejo dinamakan Museum Tosan Aji. Selanjutnya Taman Budaya yang dikembangkan di Kabupaten Purworejo disebut dengan Purworejo City Park. Dalam studi Schlehe (2011) disebutkan bahwa taman budaya (cultural theme parks) adalah bagian dari ruang publik untuk menjalankan visi inovatif terkait identitas kultural yang berorientasi global, dalam kerangka keanekaragaman kebudayaan di Indonesia.



Gambar 3. Gedung Kesenian Sarwo Edhi Kabupaten Purworejo



Gambar 4. Museum Tosan Aji Kabupaten Purworejo

Keterlibatan DKP dalam pelaksanaan program kebijakan dari Disbudpar sangat penting untuk mewarnai pelestarian kebudayaan Kabupaten Purworejo melalui kesenian daerah. Dalam pandangan Kangas et.al (2017: 129), peran aktor tersebut merupakan revitalisasi peran baru bagi aktor-aktor kebudayaan untuk merawat kebudayaan yang mencakup seni, warisan masa lalu, kegiatan-kegiatan sosial-budaya, serta berpotensi mengubah politik kebijakan budaya.

Kerjasama yang dilakukan oleh DKP dengan Disbudpar juga telah berkontribusi untuk menautkan kembali ikatan masyarakat lokal terhadap sumber penghidupan masa lalu. Misalnya dalam pementasan seni Bumi Kayu Arahiwang, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengenang dan menghargai cikal bakal kelahiran Purworejo, seperti tercatat di prasasti Boro di Bumi Kayu Arahiwang pada tahun 901 masa Mataram Kuno. Demikian pula dalam penyelenggaraan Festival Bogowonto dan upacara kemerdekaan RI di tepian sungai Bogowonto. Seperti diketahui, sungai Bogowonto adalah pusat kehidupan masyarakat Bagelen pada masa lalu. Dulu, masyarakat setempat banyak menggantungkan penghasilannya dari bercocok tanam di pinggiran sungai tersebut yang dikenal sangat subur.



Gambar 5. Festival Bumi Kayu Arahiwang



Gambar 6. Festival Sawunggalih Art

Upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk merawat seni dan budaya juga tercermin dari program Romansa Purworejo 2020 yang digagas oleh Bupati Purworejo, Agus Bastian. Beberapa event kebudayaan yang bersifat tahunan lainnya misalnya Pengetan Jumenengan, Gebyar Muharram, Festival Sawunggalih Art dan Festival Kuliner. Pengetan Jumenengan merupakan festival tradisional memperingati pengangkatan Adipati RAA Cokronegoro I yang merupakan bupati pertama Purworejo sejak diubahnya nama dari Brengkelan menjadi Purworejo pada 27 Februari 1831. Pada tahun 2019, pelaksanaan festival tradisional Pengetan Jumenengan adalah yang pertama dilakukan sekaligus menandai penetapan Hari Jadi Purworejo yang baru, yaitu 27 Februari 1831. Terkait mengenai perubahan hari jadi kabupaten tersebut dapat dibaca dalam karya Carey (2017).

Selanjutnya Gebyar Muharram merupakan festival masyarakat yang sudah terpengaruh oleh nilai dan tradisi Islam, yaitu tradisi untuk memperingati Tahun Baru Islam. Adapun Festival Sawunggalih Art menampilkan parade tari lokal. Sawunggalih sesungguhnya adalah nama bupati Kutoarjo. Saat ini Kutoarjo menjadi salah satu kecamatan dalam lingkup Kabupaten Purworejo. Selanjutnya Festival Kuliner adalah festival makanan dan jajanan tradisional masyarakat di daerah tersebut (*sorotpurworejo.com*, 15 Maret 2019).

Tentu kehadiran negara menjadi bagian yang sangat krusial menopang pelestarian kebudayaan. Kehadiran negara untuk merawat kebudayaan daerah dapat pula meneguhkan eksistensi negara sebagai pelindung dan pengayom dalam membangun peradaban masyarakatnya. Dalam konteks demikian, negara mengambil posisi sebagai pelestari kebudayaan. Namun dalam pandangan Giddens seperti dikutip dalam Abdullah (2009 : 5), negara juga dapat membuat pola terhadap hubungan kekuasaan yang terbentuk. Kebudayaan tidak akan lepas dari ruang di mana kebudayaan tersebut dibentuk, dipertahankan atau

sebaliknya, diubah. Artinya, kehadiran negara untuk merawat kebudayaan menjadi penting sepanjang kehadirannya tidak menghilangkan karakteristik *indigenous* dari kebudayaan lokal yang dimiliki. Kehadiran negara untuk merawat kebudayaan pada saat yang sama juga berpotensi merajut kembali pola terhadap hubungan kekuasaan yang baru di tingkat daerah.

Selain itu, dalam merawat ragam unsur kebudayaan lainnya, kerjasama Disbudpar dan DKP juga belum memberi pengakuan khusus terhadap kontribusi perempuan. Pementasan seni Bumi Kayu Arahiwang yang dilakukan untuk mengenang cikal bakal Purworejo misalnya, berlaku secara netral sebagai upaya merawat kebudayaan belaka. Demikian pula Festival Bogowonto, Romansa Purworejo, Pengetan Jumenengan, Gebyar Muharram, Festival Sawunggalih Art dan Festival Kuliner.

Upaya Disbudpar dan DKP untuk menyelenggarakan berbagai festival sebagai warisan budaya takbenda tentu menjadi hal yang positif, karena Indonesia sebagai anggota the Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage dari UNESCO, belum memiliki UU warisan budaya takbenda (Dachlan, 2015). Di tingkat pemerintah daerah, upaya Disbudpar yang dibantu oleh DKP dalam menyelenggarakan berbagai festival seperti Pentas Seni Bumi Kayu Arahiwang, Festival Bogowonto, Pengetan Jumenengan, Romansa Purworejo, Gebyar Muharram, Festival Sawunggalih Art, dan Festival Kuliner menjadi bagian yang sangat penting dari upaya melestarikan warisan budaya takbenda.



Gambar 7. Romansa Purworejo

Di samping kebudayaan takbenda, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kebudayaan kebendaan. Hal tersebut tampak dalam upaya perlindungan cagar budaya yang telah dilakukan. Pada level nasional, kebijakan terkait dengan cagar budaya adalah UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun untuk Purworejo belum ada kebijakan daerah yang lebih bersifat operasional dan spesifik kedaerahan untuk melindungi cagar budaya. Hingga tahun 2018, belum ada kebijakan khusus seperti peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan benda cagar budaya. Studi Jatmiko (2012) juga memperlihatkan bahwa hingga tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Purworejo belum secara optimal melakukan pelestarian terhadap benda cagar budaya.

Namun demikian, Disbudpar Kabupaten Purworejo telah mencoba untuk mengelola cagar budaya. Mereka telah berupaya melakukan pelestarian cagar budaya dengan menginventarisir sebagian cagar budaya dan memasukkannya ke dalam Museum Tosan Aji, meskipun hanya didukung oleh dana yang minim. Hingga Maret 2018, Disbudpar berhasil menginventarisir 156

cagar budaya yang tersebar di berbagai sudut wilayah Purworejo. Disinyalir jumlah cagar budaya berupa bangunan dan benda bersejarah yang terdapat di Kabupaten Purworejo jumlahnya mencapai ribuan (krjogja.com, 21 Maret 2018). Hal yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Purworejo tersebut mampu mengisi kekosongan peraturan daerah tentang perlindungan cagar budaya. Artinya ketika belum ada kebijakan daerah tentang perlindungan cagar budaya, namun keberadaan daftar inventaris cagar budaya dapat menjawab kebutuhan pelestarian warisan cagar budaya.

Jika mencermati langkah-langkah kebijakan dari pemerintah daerah di atas, tampak masih kurang menyentuh pada aspek penguatan nilai-nilai budaya lokal, dalam hal ini budaya Bagelen. Koentjaraningrat (1985: 5) menyebutkan bahwa kebudayaan juga menyangkut nilai dan perilaku. Sejak reformasi bergulir, kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pelestarian kebudayaan meliputi pendirian dewan kesenian daerah yang menyelenggarakan pementasan seni dan festival, museum daerah, serta taman budaya. Jika mengacu pada studi Jones (2015 : 12-18), penekanan kebudayaan menjadi kesenian diakibatkan kebijakan yang diterapkan sepanjang kekuasaan Orde Baru.

Kehadiran negara melalui kebijakan yang diterapkan telah menjadikan pemahaman yang berbeda atas praktik-praktik kebudayaan yang berlaku. Tentu saja, berbagai kebijakan mendukung budaya lokal tersebut bukannya tidak berarti untuk melestarikan budaya lokal. Namun jika upaya tersebut disertai dengan berbagai kajian ataupun forum untuk menguatkan penggalan nilai-nilai lokal masyarakat Bagelen, tentu akan jauh komprehensif. Refleksi nilai-nilai masyarakat lalu untuk mendukung pelestarian kebudayaan masa kini, tentu tidak hanya melalui kebudayaan yang bersifat kebendaan dan takbenda belaka. Lebih dari itu, warisan generasi ke generasi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai dan perilaku yang menebar

kebaikan. Nilai-nilai lokal juga perlu menjadi landasan bagi kehidupan generasi-generasi selanjutnya.

Pada akhirnya terlihat bahwa proses inisiasi merawat dan mengembangkan kebudayaan merupakan proses pengambilan keputusan yang panjang dan tidak bisa dipisahkan dari praktik kekuasaan masa lalu. Sebagai masyarakat pinggiran, budayawan lokal, Sukoso, bahkan menyebutkan bahwa masyarakat Bagelen sudah dihilangkan jati dirinya sejak pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, inisiasi kebijakan untuk merawat tatanan kebudayaan lokal menjadi upaya yang tidak serta mudah dilakukan, dibutuhkan waktu panjang dan energi besar untuk menggali keseluruhan aspek tatanan budaya lokal. Usaha itu juga merupakan upaya meneguhkan kembali identitas kebudayaan Jawa pinggiran yang selama ini senantiasa tergerus oleh kebudayaan Jawa pusat. Kelak pada waktunya, upaya penggalian nilai-nilai budaya lokal Bagelen juga akan mendorong adanya pengakuan mengenai kontribusi luar biasa dari kaum perempuan lokal dalam menjaga adat istiadat dan budaya setempat.

Kebijakan desentralisasi telah membuka peluang secara luas bagi pemerintah daerah untuk merawat kebudayaan lokal. Dalam hal ini, tinggal komitmen dari pemerintah daerah untuk mendorong seluas-luasnya jajaran pemerintahannya dan masyarakat untuk menjaga tradisi dan kebudayaan sendiri. Dalam konteks ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk merawat tradisi dan budaya Bagelen sudah cukup berkembang. Sejauh ini upaya pemerintah daerah untuk merawat kebudayaan lokal sudah menunjukkan inisiasi yang positif dan menyasar budaya takbenda dan yang bersifat kebendaan. Namun kiranya upaya merawat budaya tersebut belum disertai perhatian pemerintah daerah berupa penggalian nilai-nilai lokal masyarakat Bagelen. Penggalian tersebut penting dilakukan mengingat kebudayaan juga mencakup aspek nilai dan perilaku bukan hanya warisan takbenda dan kebendaan. Penggalian terhadap nilai-nilai

lokal akan mendorong adanya pengakuan terhadap kontribusi perempuan lokal dalam menjaga tradisi Bagelen. Dalam hal ini, perlu untuk mengembangkan forum-forum ilmiah yang mendorong tergalinya nilai-nilai budaya lokal. Kelak diharapkan eksistensi perempuan sebagai penjaga tradisi budaya juga ikut terdorong untuk diakui kontribusinya. .

5.2. Kontribusi Perempuan dalam Perkembangan Masyarakat Bagelen

Untuk melihat kontribusi perempuan dalam perjalanan awal masyarakat Bagelen dapat dimulai dari bahasan tentang asal mula masyarakat Bagelen. Versi yang menjelaskan asal mula masyarakat Bagelen sesungguhnya sangat banyak. Namun tulisan ini menggunakan sumber resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Purworejo. Menurut buku *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo* (tanpa tahun), asal mula masyarakat Bagelen tidak dapat dipisahkan dari prasasti batu yang kemudian dinamakan Prasasti Kayu Ara Hiwang atau Prasasti Boro Tengah (823 M). Peristiwa sebagaimana terpahat dalam prasasti berada dalam peradaban Hindu-Buddha di zaman Pemerintahan Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung pada masa kekuasaan Mataram Hindu di tanah Jawa.

Dalam konteks dari prasasti tersebut, informasi tentang perempuan tidak tampak atau mungkin tidak dimunculkan. Tokoh dalam prasasti tersebut adalah Dyah Sala Putra Sang Ratu Bajra, seorang petinggi dari kerajaan Mataram Hindu. Prasasti ini menuturkan kebudayaan masyarakat di lembah Sungai Bagawanta yang digambarkan hidup dalam kemakmuran, ketertiban, kehidupan beragama yang baik, pemerintahan yang teratur dan berwibawa, serta kegotongroyongan masyarakat. Apakah perempuan memiliki kontribusi penting dalam memelihara kemakmuran dan ketertiban masyarakat pada masa itu, tidak ada informasi yang menjelaskannya. Tidak hadirnya informasi tentang perempuan menunjukkan bahwa pihak yang memproduksi pengetahuan adalah penguasa yang didominasi laki-laki sehingga informasi

tentang tokoh ataupun kontribusi perempuan tidak dihadirkan. Padahal sesungguhnya kemakmuran dan ketertiban tidak lepas dari dengan dimensi sifat-sifat feminin.

Terkait kontribusi perempuan, dalam sejarah Bagelen tokoh perempuan yang lekat dengan masyarakat Bagelen adalah Nyai Ageng Bagelen. Nama Nyai Bagelen juga disebut sebagai Roro Rengganis (Jarot Heru Santosa, 2013). Sayangnya sejauh ini sumber historiografi tentang Nyai Bagelen bukan merupakan prasasti atau sumber tertulis, tetapi bersumber pada cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nyai Bagelen adalah nenek moyang masyarakat Bagelen yang memiliki figur sebagai petani, peternak, penenun, sambil mengurus pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah ditinggalkannya. Dalam hal ini, karakter seorang perempuan Bagelen digambarkan sebagai perempuan yang memiliki prinsip berani “melawan” suami untuk mempertahankan pendapat dan dianggap memang betul. Perempuan Bagelen juga digambarkan sebagai perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu ketika Raden Ngawu-awu Langit (suaminya) pulang ke daerah asalnya, Nyai Bagelen menggantikan posisi suaminya sebagai pemimpin di wilayahnya. Nyai Bagelen adalah perempuan yang setia. Ketika suaminya meninggal, dirinya memilih *moksa* atau menghilang.

Dalam hal nama, sesungguhnya penyebutan Nyai Bagelen dengan namanya sendiri juga menunjukkan pengakuan kultural terhadap kedudukan penting kaum perempuan. Dalam hal ini, perempuan diakui identitasnya dengan namanya sendiri, tanpa bergantung pada nama Nyai dari nama suami. Sangat mungkin bahwa cara penulisan nama Nyai Bagelen dipengaruhi oleh *mainstream* budaya Jawa pinggiran yang lebih egaliter dan bebas dibanding dengan budaya Jawa pusat (Yogyakarta-Solo). Artinya identitas tokoh perempuan sendiri sesungguhnya diakui dan dihargai pada masa lalu. Dalam hal ini, identitas tersebut dikonstruksikan dalam konteks laki-laki dan perempuan melalui nama seseorang. Identitas sebagai laki-laki akan menjadi penanda

bahwa mereka adalah satu kelompok laki-laki, dan menjadi penanda perbedaan terhadap kelompok yang “berhadapan” yaitu kelompok perempuan (Katryn Woorward, 1997). Secara jelas identitas perempuan Nyai Bagelen sebagai dirinya sendiri diakui masyarakat dan keturunannya, tidak disembunyikan.

Namun seiring perjalanan waktu, ketokohan Nyai Bagelen kemudian direduksi pada persoalan bias-bias gender. Ketika masyarakat menjadi sumber pengetahuan, maka pengetahuan yang terus menerus direproduksi juga akan berhadapan dengan ideologi yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan, sehingga kebesaran tokoh perempuan bisa lekang oleh waktu karena bias gender tersebut. Dalam konteks demikian Irwan Abdullah (2018) menyebutkan bahwa ketokohan Nyai Bagelen mengalami *in appropriase*, ketika faktor *femaleadership* menjadi tidak tampak sehingga *public knowledge* mengenai keutamaan yang ada dalam diri Nyai Bagelen sebagai tokoh perempuan lokal tidak banyak menjadi perhatian. Figur keberadaan mengenai Nyai Bagelen lebih banyak disimbolisasi dengan hal-hal yang bersifat mitos, sehingga keutamaan-keutamaan yang ada dalam diri tokoh perempuan menjadi tidak tampak. Kapasitas Nyai Bagelen sebagai pemimpin lokal yang mampu mengelola sawah pertanian, beternak, dan memiliki kemampuan menenun, tidak banyak dipahami oleh khalayak. Demikian pula terkait keberadaan Nyai Bagelen yang memiliki sifat tegas dan mampu mempertahankan pendapat atas sesuatu kebenaran, ingatan publik terhadap hal tersebut banyak mengalami keterputusan.

Perempuan yang memiliki kuasa, seperti halnya Nyai Bagelen, sesungguhnya merupakan representasi perempuan yang hebat dan berdaya. Nyai Bagelen merupakan perempuan yang memiliki karakter menonjol, dan dalam dirinya memiliki power, dan seharusnya dilihat dari sisi yang positif, bukan hanya karena ditakuti atau takut kuat saja. Oleh karena, tafsir segala

sesuatu juga seharusnya utuh dan berimbang. Artinya keberadaan tokoh perempuan jahat memang ada, tapi juga banyak juga tokoh perempuan yang mempunyai citra positif. Kaitannya dengan hal tersebut, sangat tergantung pada pengalaman kita dalam melihat dan memahami cerita-cerita, baik cerita yang nyata maupun dongeng (Ahimsa Putra, 13 Oktober 2019).

Ahimsa menekankan bahwa segala sesuatu dalam perkembangan masyarakat tergantung pada siapa menulis apa. Para sejarawan paling banyak menulis para tokoh yang populer saja. Dalam hal ini, mungkin Nyai Bagelen sebagai pemimpin masa lalu juga tidak diakui sebagai perempuan tangguh. Dalam buku Carey, Peter, Hoube, Vincent (2016) misalnya, keberadaannya juga tidak masuk perempuan perkasa di Jawa. Demikian pula buku Krishna Bayu dan Wintala Achmad (2018), juga tidak menempatkannya sebagai salah satu perempuan yang tangguh. Keberadaannya sebagai pemimpin di wilayah Jawa pinggiran semakin tidak menempatkannya diakui dalam perkembangan sejarah masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki dan tokoh-tokoh yang populer saja. Bahkan penulis sejarah juga paling banyak diisi oleh tokoh-tokoh laki-laki.

Hingga kini, nama Nyai Bagelen sesungguhnya masih melekat dalam masyarakat Bagelen, khususnya di Kabupaten Purworejo. Namun, ingatan publik itu tentang Nyai Bagelen hanya sebatas tokoh masa lalu yang lekat dengan kesaktian dan bertuah. Padahal sosok Nyai Bagelen seharusnya juga ditampilkan sebagai perempuan yang mampu mengurus bidang pertanian, industri dan tenun yang mampu menginspirasi banyak penduduk Bagelen. Dalam hal ini, terdapat reduksi tentang kontribusi Nyai Bagelen, hanya sebatas sakti dan bertuah, namun tidak banyak dikenal oleh publik mengenai kemampuan dan ketokohan Nyai Bagelen sebagai pemimpin politik yang juga mampu dalam hal pengembangan industri dan pertanian.

Adapun sejarah modern masyarakat Purworejo dan Kebumen setidaknya memperlihatkan capaian pembangunan gender yang belum memperlihatkan kemanfaatan yang sama antara laki-

laki dan perempuan. Dalam dunia politik, kehadiran sosok Rustriningsih misalnya, menjadi satu dari sangat sedikit perempuan hebat di era modern yang mewarnai sejarah politik masyarakat setempat. Ketika dulu perempuan seperti Nyai Bagelen pernah menjadi pemimpin di wilayah tersebut, pada masa kini terjadi keterputusan sehingga sosok Nyai Bagelen hanya dikenal sebagai sakti dan bertuah, bukan menginspirasi lahirnya tokoh perempuan yang hebat di masa kini.

Selain sedikitnya ketokohan perempuan dalam politik pada masa era modern, di Kabupaten Purworejo dan Kebumen kaum perempuan masih tertinggal sudah dengan laki-laki jika dilihat dari capaian pembangunan gender, seperti yang dijelaskan di muka. Dalam hal ini, populasi perempuan yang hampir berimbang dengan laki-laki belum diikuti oleh akses dan manfaat yang sama oleh kaum perempuan di bidang strategis kehidupan. Dalam dunia pendidikan, di kedua wilayah tersebut angka partisipasi pendidikan perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Kondisi yang sama juga terjadi dalam kesempatan kerja yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, kaum perempuan masih diidentikkan dengan pekerjaan domestik. Padahal jika menengok di masa lalu, ketokohan Nyai Bagelen tidaklah digambarkan dengan pekerjaan rumah tangga saja, namun jauh lebih berwarna daripada itu, bahwa kaum perempuan mampu sebagai pemimpin masyarakat.

Ketertinggalan perempuan di bidang pendidikan, kesempatan kerja, maupun rendahnya keterwakilan politik perempuan setidaknya memperlihatkan kehebatan perempuan di masa lalu pada masyarakat tersebut tidak menjadi tonggak penggerak bahwa sesungguhnya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling melengkapi. Keduanya juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama. Oleh karena itu sesungguhnya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan peluang yang sama untuk mendapatkan akses yang setara dengan laki dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.

Selanjutnya tulisan ini akan mengeksplorasi kontribusi perempuan pinggiran dalam penjunjung agama. Studi Risa Permanadeli (2015 : 250) menunjukkan bahwa perempuan dalam mitologi Jawa menjadi simbol makhluk hidup yang menjaga kehidupan yang selamat. Perempuan Jawa direpresentasikan sebagai makhluk yang selalu bergerak untuk memperjuangkan keadaan hidup yang selamat. Perempuan Jawa memegang kekuatannya menyeimbangkan kehidupan dunia nyata. Berkaitan dengan hal tersebut, kisah yang bernuansakan tatanan kosmologis dalam mitos kesuburan dikenal di seluruh pelosok tanah Jawa. Simbol kesuburan dalam kepercayaan Jawa ada pada sosok Dewi Sri (perempuan) sebagai dewi padi. Kisah yang berkaitan dengan Dewi Sri mengandung ajaran tentang penanaman padi dan kehidupan yang subur. John Pamberton (2003 : 280) menunjukkan bahwa kisah Dewi Sri ada di seluruh tanah Jawa, meskipun dengan berbagai versi sosok dan bentuk pemujaan yang relatif berbeda. Bahkan kisah Dewi Sri sebagai lambang kesuburan terutama dalam masyarakat petani juga dikenal di tanah Pasundan.

Masyarakat Bagelen memiliki karakteristik dasar sebagai masyarakat petani atau agraris yang religius. Hal tersebut dapat diamati dari situasi lingkungan yang agraris dan kemudian berkembang menjadi masyarakat animisme. Karakteristik religius dapat dipahami dari keyakinan yang bersifat animisme, kemudian masyarakat memeluk Hindu dan Buddha dan selanjutnya Islam. Ketika masa perkembangan Hindu-Buddha, mereka memuliakan Dewa Siwa (Hindu) dan diramu dengan kebudayaan Jawa. Sebagian masyarakat setempat juga memeluk agama Buddha. Masyarakat Bagelen juga dikenal sebagai masyarakat religius yang hidup secara berdampingan antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam hal ini, tokoh agama tentu saja memiliki posisi yang istimewa di tengah kehidupan masyarakat lokal.

Terkait dengan perkembangan Islam di wilayah Bagelen, terdapat tiga situs utama yang menunjukkan awal perkembangan Islam di masa lalu, yaitu petilasan Sunan Geseng, Masjid Sunan Geseng, dan Masjid Santren (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purworejo, 2008). Petilasan Sunan Geseng berada di bukit yang terletak di Desa Bagelen Kecamatan Bagelen. Nama Sunan Geseng juga digunakan untuk Masjid Sunan Geseng. Masjid Sunan Geseng dibangun pada Abad 19 pada masa pemerintahan Tumenggung Cokronegoro. Bangunan masjid beratap tumpang satu dan di atasnya terdapat mustaka yang terbuat dari tanah liat. Terdiri dari ruang utama dan bangunan serambi beratap limasan.

Situs lainnya yang menandai perkembangan Islam di wilayah Bagelen adalah Masjid Santren Bagelen. Latar belakang sejarah yang berkaitan dengan masjid tersebut adalah Raja Mataram yaitu Sultan Agung yang memerintah Kerajaan Mataram pada puncak kejayaannya, yaitu 1613-1645. Masjid tersebut juga menjadi masjid tertua di wilayah Bagelen. Masjid Bagelen didirikan atas perintah istri Sultan Agung Raja Mataram. Perintah tersebut dimaksudkan untuk memberi hadiah atas jasa-jasa Kyai Baidlowi. Keterkaitan Masjid Bagelen dengan Sultan Agung diperkuat dengan adanya angka tahun 1618 pada salah satu makam yang merupakan masa pemerintahan Sultan Agung.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam perkembangan awal Islam di wilayah Bagelen tidak tampak. Tidak ada pengetahuan umum yang jelas bahwa perempuan juga ikut berkontribusi dalam menyebarkan syiar Islam di wilayah Bagelen. Situs-situs kebesaran Islam di Kabupaten Purworejo misalnya, senantiasa merujuk pada kontribusi laki-laki yang mengembangkan Islam di wilayah tersebut. Kita tidak pernah tahu bagaimanakah kehadiran perempuan dalam masa awal perkembangan Islam di wilayah tersebut. Bahkan dalam tokoh penyebaran Islam di wilayah Bagelen lainnya, yaitu Kabupaten Kebumen, juga merujuk

pada ketokohan laki-laki, yaitu Syekh Asnawi, Anom Sidakarsa, Abdul Awal, yang menyebarkan Islam di kawasan pesisir selatan Jawa. Apakah dengan demikian perempuan tidak hadir untuk mewarnai berkembangnya Islam ketika itu. Rasanya tidak mungkin penyebaran Islam ketika itu tidak diikuti oleh keterlibatan perempuan didalamnya. Salah satu buktinya adalah perintah istri Sultan Agung untuk membangun Masjid Santren Bagelen sebagai balas jasa terhadap dukungan Kyai Baidlowi terhadap Mataram. Informasi mengenai keterlibatan perempuan tentang masa-masa awal perkembangan Islam di Bagelen memang sangat minim, tetapi bukan berarti kontribusi itu tidak ada. Oleh karena itu, diperlukan penggalian lanjut untuk menunjukkan ke publik mengenai kontribusi tersebut.

Selain Islam, agama lain yang cukup berkembang pesat di wilayah Bagelen adalah agama Kristen, khususnya di Kabupaten Purworejo. Perkembangan Kristen di Purworejo mulai terjadi sebelum tiga dasawarsa Abad-20, yang menjadikan Purworejo sebagai pusat zending atau gereja-gereja Protestan Belanda. Dalam hal ini, mantan santri atau dengan kata lain mantan seorang Muslim, Kyai Sadrach, menjadi muara dari sejarah awal perkembangan Kristen di wilayah tersebut. Istilah santri dapat diselaraskan dengan pemetaan masyarakat Jawa dalam studi fenomenal dari Clifford Geertz (2017) yang dilakukan pada tahun 1955 dengan membuat skema peta budaya Jawa terbagi menjadi tiga aliran santri, abangan, dan priyayi. Kyai Sadrach adalah seorang santri yang kemudian masuk Kristen bahkan mengambil posisi sebagai misionaris. Pada 1869 Kyai Sadrach menyiarkan Kristen di Purworejo, bersama-sama tokoh Kristen perempuan yaitu Nyonya Philips dan Nyonya Oostrom Philips (Peter Carey, 2017: 221). Selain itu, untuk mendukung penyebaran Kristen di daerah tersebut, maka didirikan sekolah setingkat SMP oleh PSSK (Perkumpulan Sekolah-sekolah Kristen). Sekali lagi, kontribusi perempuan yang ikut menjaga dan menjunjung agamanya, tak banyak dikenal oleh generasi berikutnya. Pengetahuan

masyarakat tentang penyebaran Kristen di wilayah Bagelen senantiasa merujuk pada ketokohan laki-laki, yaitu Kyai Sadrach. Publik tidak menempatkan kaum hawa juga ikut berkontribusi dalam mengemban tugas keagamaannya. Salah satu studi yang dapat menjadi bukti terkait dengan hal tersebut adalah kepedulian atau misi agama Katolik yang juga menyediakan pendidikan tinggi untuk kaum perempuan yang sama dengan laki-laki di Kabupaten Magelang, tidak jauh dari Kabupaten Purworejo (Olivier Johannes Raap, 2015 : 46). Terlihat bahwa agama sesungguhnya juga memiliki andil besar untuk kemajuan pendidikan kaum hawa.

Dengan demikian, studi tentang konfigurasi perempuan perjalanan suatu kelompok masyarakat sesungguhnya juga menjadi upaya untuk menempatkan kaum perempuan sebagai pusat memahami bangunan kebudayaan secara utuh. Kondisi demikian dapat terjadi karena bidang-bidang ilmu pengetahuan didominasi paham androsentrisme, yaitu konstruksi yang memberi prioritas dan kekuasaan pada laki-laki, baik melalui tatanan politik ataupun ekonomi, yang menyebabkan secara langsung atau tidak langsung terjadinya subordinasi terhadap perempuan (Melani Budianta, 2002). Hal itu menjadikan kehadiran perempuan dalam perjalanan sejarah suatu kelompok masyarakat seringkali tidak tampak.

Upaya untuk mengkaji posisi perempuan dalam sebuah struktur kebudayaan pinggiran adalah bagian dari menunjukkan pentingnya perlunya pengetahuan yang berlandaskan *women ways of knowing* atau cara produksi pengetahuan yang berdasar prinsip feminitas. Vandana Shiva sedang menempatkan kaum perempuan yang pada awalnya sebagai objek utama perubahan, justru sebagai pusat proses perubahan serta penciptaan pengetahuan. Sebuah ilmu pengetahuan akan berhasil penerapannya bila ilmu itu sudah diterima dan diintegrasikan dengan sistem budaya yang ada. Bila ilmu pengetahuan tidak menghasilkan sesuatu yang penting dan berarti bagi sebuah kelompok masyarakat, maka ilmu pengetahuan belum berhasil dibudayakan

(Vandana Shiva, 1997). Studi ini memperkuat bukti empirik bahwa sesungguhnya banyak perempuan dalam sejarah kekuasaan dan budaya lokal mampu mengambil peran penting dalam menorehkan sejarah sekaligus melestarikan adat istiadat, namun tidak banyak mendapatkan perhatian dan pengakuan.

5.3. Representasi Perempuan Bagelen dalam Seni dan Budaya

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan budaya Banyumas, beberapa seni budaya khas Bagelen mirip dengan seni budaya Banyumas seperti *jathilan* yang mirip dengan *ebeg* di Banyumas. Adapun seni budaya *ronggeng* atau *teledhek* di wilayah Bagelen merupakan representasi dari tarian ritual yang hidup dalam tradisi petani Jawa pada umumnya. Masyarakat Banyumas menyebutnya sebagai *lengger*, sedangkan di pesisir utara Jawa disebut sebagai *tayub*. Adapun di Pulau Jawa bagian barat, tarian tersebut disebut sebagai *jaipongan* dan di ujung timur Pulau Jawa disebut *gandrung*. Tarian ritual tersebut menggambarkan pemujaan petani Jawa terhadap Dewi Sri yang diyakini sebagai lambang kesuburan dan panen padi yang berlimpah. Studi Pamberton menunjukkan bahwa kisah Dewi Sri ada di seluruh tanah Jawa, meskipun dengan berbagai versi sosok dan bentuk pemujaan yang relatif berbeda (John Pamberton, 2003).

Masyarakat Jawa memang secara tradisional membagi ruang kehidupannya menjadi dua yaitu domestik dan publik. Seiring dengan perkembangan waktu, ruang domestik yang dilambangkan dengan peran perempuan melalui sosok Dewi Sri juga mengalami pergeseran. Secara umum, ruang publik menjadi lebih unggul, di mana didalamnya laki-laki lebih dominan. Padahal keberadaan perempuan dalam menjalankan ruang domestik tidak berarti tidak ada artinya, pemaknaan terhadap hal tersebut tergantung siapa yang memaknai dan proses berjalan seperti apa (Ahimsa Putra, 13 Oktober 2019). Kenyataannya tidak ada ruang publik dapat berjalan normal tanpa dukungan dari ruang domestik. Selain itu, kekuatan perempuan di ruang

domestik tidak dilihat secara berarti sebagai posisi yang juga mendukung berjalannya sistem sosial, sehingga tampak tidak punya arti, bahkan penglihatan oleh perempuan sendiri.

Terkait seni dan budaya, Kabupaten Kebumen dan Purworejo merupakan salah satu penyebaran wayang golek yang lahir di pesisir utara Jawa pada Abad ke-16 dan dipengaruhi oleh sandiwara boneka Tiongkok, selain wilayah Pasundan. Merujuk studi Clifford Geertz (1992) seni budaya harus dilihat sebagai jendela istimewa untuk memahami *world view* dan etos masyarakat tradisional yang memiliki nilai, norma dan tradisi yang khas. Keaslian sebuah budaya berwujud gagasan, pikiran, norma, atau konsep dalam kebudayaan tersebut. Identifikasi Koentjaraningrat terhadap bentuk seni budaya khas Bagelen berupa *wayang urang*, *jathilan*, *ronggeng*, *wayang kulit*, *wayang jemblung*, dan *perjanjen*. Pada masa kejayaan keraton-keraton Jawa dulu, wilayah Bagelen dikenal sebagai daerah yang melahirkan para seniman memproduksi topeng untuk kesenian wayang urang (Koentjaraningrat, 1984).

Identifikasi yang dilakukan oleh ahli antropologi terkemuka tersebut terhadap budaya Bagelen, cenderung lebih mengarah pada kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan yang universal. Kesenian dalam budaya Bagelen yang dikemukakan di atas seperti wayang urang, jathilan, ronggeng, wayang kulit, wayang jemblung, perjanjian dan sebagainya, menjadi gambaran seni budaya yang menonjol di kawasan Bagelen. Sesungguhnya, sebagian dari seni budaya tersebut seperti wayang jemblung, perjanjian, jamjaneng, dan angguk memperlihatkan seni budaya lokal yang bernuansakan keislaman.

Namun, seni tradisi yang sampai hari ini dilekatkan identik dengan Bagelen adalah tarian *dolalak*. Sejarah asal mula kesenian tari dolalak terkait dengan masa kolonial Belanda membangun tangsi-tangsi militer di kawasan Purworejo sebagai pusat pertahanan. Dalam hal ini,

para prajurit pribumi yang diharuskan ikut kemiliteran oleh Belanda mengisi waktu luang dengan menari, menyanyi dan berdansa, sehingga akhirnya berkembang menjadi tari dolalak.

Tari dolalak awalnya dilakukan oleh penari laki-laki, tetapi dalam perkembangannya penari tari dolalak didominasi oleh perempuan. Pergeseran dari penari dolalak laki-laki menjadi penari dolalak perempuan menjadikan eksistensi seni tradisional tersebut semakin berkembang di masyarakat. Keberadaan tari dolalak pada akhirnya berhubungan erat dengan kebiasaan masyarakat setempat, terutama dalam kaitannya dengan cerita rakyat atau legenda lokal (Jarot Heru Santosa, 2013). Dalam pandangan antropologi, seni, dongeng, fiksi dapat merepresentasikan realitas seiring dengan cara pandang fenomenologi, di mana subjektivitas selalu hadir mengiringi cara pandang sehingga muncul tafsir dan persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam antropologi, kesenian adalah realitas. Realitas sesungguhnya sebenarnya sudah tidak ada, yang ada adalah realitas sesuai dengan siapa yang menulis. Dengan demikian ketika anggapan dolalak ditemukan oleh laki-laki maka hal tersebut tergantung siapa yang menulis sejarah tersebut.

Tradisi tarian dolalak sering diselenggarakan ketika kegiatan bersih desa, *ruwatan*, dan sebagainya. Seni tari dolalak merupakan akulturasi seni tradisional dengan seni khas kolonial. Saat ini lebih kurang terdapat 50 kelompok tari Dolalak. Tari dolalak diperankan oleh perempuan yang berlagak seperti gerakan para serdadu Belanda pada masa perang. Kontribusi perempuan dalam menjaga tradisi ini menjadikan tari dolalak terus berkembang. Studi Santosa (2013, 227-234), menunjukkan bahwa dalam menjaga tradisi dalam kesenian dolalak, perempuan menjadi sosok yang tangguh. Perempuan adalah “ibu bumi” yang lekat dengan kesuburan, sosok yang diteladani, serta mampu menjaga nilai-nilai dan norma masyarakat tradisional.

Adapun studi dari Setyawan (2016, 118-119) mencatat bahwa upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan eksistensi tari dolalak, yaitu meliputi pementasan tari dolalak dalam peringatan hari besar nasional, pementasan rutin di Gedung Kesenian Daerah, tari dolalak untuk menyambut tamu, mengikuti berbagai event kesenian. Selain itu pemerintah setempat telah menetapkan Desa Kaliharjo sebagai pusat tari dolalak dan desa wisata, bahkan tari dolalak juga sudah mendapat hak paten tahun 2011. Namun pengembangan seni tari tersebut masih melupakan bahwa kontribusi terbesar dalam menjaga seni tari itu dilakukan oleh kaum perempuan. Dalam hal ini, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah daerah kepada peningkatan kualitas kehidupan perempuan penari dolalak, sebagai pihak yang paling berkontribusi menjaga warisan budaya kesenian tersebut.



Gambar 8. Pagelaran Dolalak di Kabupaten Purworejo

Studi yang dilakukan oleh Heru Santoso menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam mengangkat seni tradisi, walaupun pada saat ini cenderung terjadi pergeseran peran perempuan sebatas panggung pertunjukan. Di dalam keberhasilan sebuah seni pertunjukkan baik secara tradisional dan yang sudah berkembang modern, kaum perempuan memiliki peranan yang sentral. Kenyataannya, perkembangan dolalak di Desa Kaliharjo misalnya, juga pada saat tarian tersebut diperankan oleh perempuan. Perkembangan tari dolalak oleh perempuan seperti diakui oleh salah satu pengelola kesenian di desa tersebut, yang mengatakan bahwa tarian Dolalak yang diperankan oleh perempuan menjadikan tarian tersebut lebih menarik. Kelompok tari dolalak di Kaliharjo memiliki lebih kurang 40 anggota, tetapi perempuan yang memainkan dolalak bukan hanya penari yang tergabung kelompok seni, namun juga hampir semua perempuan di desa tersebut, dari ibu-ibu PKK sampai anak-anak SD. Walaupun demikian, beberapa penari dolalak laki-laki juga masih ada di desa tersebut (Wawancara dengan pengelola Dolalak Desa Kaliharjo, 28 Agustus 2019).

Sungguh tidak banyak sumber yang membahas secara lengkap asal mula tari Dolalak beserta sistem budaya yang melingkupinya. Kurangnya kehadiran perempuan dalam penulisan sejarah dolalak menjadi sebuah pertanyaan yang sangat serius. Apakah perempuan memang tidak menghiasi perkembangan sejarah, ataukah peran oleh perempuan ditiadakan padahal sesungguhnya kuat. Terkait dengan hal tersebut, Ahimsa Putra juga menegaskan pentingnya bagi perempuan untuk terus eksis dalam bidangnya dan dapat menjangkau ke sektor publik yang lebih luas. Sektor publik masih banyak dikuasai laki-laki dan keterlibatan perempuan dalam sektor domestik tidak lebih bermakna daripadanya. Oleh karena itu, Ahimsa Putra mencontohkan dalam perang misalnya, yang tertulis dalam sejarah mereka yang terjun langsung ke lapangan ikut berperang, tetapi kontribusi perempuan dalam mengelola dapur umum tidak pernah dilihat

sebagai hal yang sangat bermakna mendukung keberhasilan perang. Terkait dengan hal itu, sejarah dolalak yang ditemukan serdadu laki-laki, bisa jadi keberadaan perempuan pada saat itu, yaitu pada saat perang, tidak pernah dilihat sebagai hal yang berarti. Oleh karena itu, dapat “dimaklumi” bahwa asal muasal tari *dolalak* yang diakui dalam tutur lisan masyarakat setempat, ditemukan serdadu laki-laki yang sedang istirahat dalam barak-barak masa peperangan. Bahwa kaum perempuan juga hadir di barak-barak tersebut, entah sebagai serdadu ataupun sebagai pihak yang menyediakan masakan di dapur, sama-sama mungkin, walaupun kedua kemungkinan itu tidak pernah dituturkan sebagai bentuk kontribusi perempuan dalam perang, atau kontribusi dalam menemukan tari *dolalak*.

Dalam pandangan pengelola kesenian dolalak (laki-laki), dolalak semakin berkembang ketika dimainkan oleh perempuan karena perempuan ketika menari dolalak lebih dapat menarik penonton dan membuat suasana tontonan menjadi lebih meriah jika dimainkan perempuan. Dalam konteks ini, laki-laki yang memberi tafsir bagaimana perkembangan dolalak seolah didorong oleh daya tarik perempuan sebagai penari dolalak. Sisi pandang yang berbeda jika mungkin yang mengelola dolalak adalah seorang perempuan maka tafsir yang muncul mungkin “lebih memihak” bahwa perkembangan dolalak adalah campur dan buah tangan dari figur-figur perempuan yang bekerja keras untuk selalu menari dan melestarikan dolalak. Cara-cara pandang yang demikian yang perlu ditekankan, yaitu kemampuan penulis sejarah dari sudut pandang mana, hal tersebut yang menentukan ia akan mengungkap narasi-narasi yang selama ini tersembunyi.

Konon tarian dolalak terbentuk sekitar tahun 1915 ketika kolonial Belanda masih kuat bercokol di bumi pertiwi. Dalam konteks demikian, Peter Carey menjelaskan bahwa arsip-arsip Belanda umumnya mencerminkan realitas penjajahan yang didominasi kaum laki-laki. Bahkan

ditegaskan oleh Peter Carey bahwa pada masa itu perempuan elite Jawa terbelit dalam ruang yang sempit (Peter Carey, 2016). Oleh karena itu tidak heran kalau kesenian-kesenian lahir di kalangan rakyat biasa dan inisiasi kelahirannya tetap didominasi laki-laki. Namun, ketika Dolalak dimainkan oleh perempuan, nyatalah bahwa perempuan mampu menjadi penjaga seni kebudayaan dan tradisi.

Uraian di atas menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan seni dan adat istiadat, kontribusi perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Studi yang dilakukan Heru Santoso di atas adalah bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya perempuan juga mengisi ruang *public knowledge* -meminjam istilah Irwan Abdullah)-. Hanya karena realitas sejarah selama penjajahan (dalam hal ini penjajahan kolonial Belanda) memperlihatkan dominasi laki-laki, maka kontribusi perempuan tidak tampak, apalagi bagi perempuan di daerah pinggiran. Pada masa itu, perempuan elit Jawa banyak terkungkung dalam lingkaran kuasa yang sempit, seperti diperlihatkan oleh studi Peter Carey di atas. Dalam hal ini, Ahimsa Putra meyakini peran perempuan sepanjang perjalanan sejarah pasti ada, tinggal bagaimana dan siapa yang mau menuliskannya. Masalahnya sejarah tidak pernah ditulis secara netral, namun bias laki-laki atau kuasa yang dominan. Bahkan dalam awal peradaban manusia, dalam kacamata antropolog, peran perempuan dalam masyarakat meramu tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang hebat dan luar biasa. Namun ketika laki-laki mengambil peran sebagai masyarakat berburu, maka kaum laki-laki ditempatkan sebagai figur yang heroik dan berjasa. Padahal penulisan sejarah selalu menampilkan hal-hal yang menonjol baru dan menjadi perhatian, sementara hal-hal yang bersifat rutinitas, seperti memasak, tidak pernah dilihat sebagai hal yang strategis ditulis dalam sejarah.

Perkembangan tari dolalak harus diakui menjadi sebagai bentuk kontribusi besar kaum perempuan. Ketika tari dolalak ditemukan oleh serdadu laki-laki, maka sangat mungkin itu hanya

persoalan penulisan sejarah yang menimbulkan adanya bias laki-laki. Oleh karena itu, ketika banyak kesenian dan budaya berkembang berkat sosok perempuan maka perlu dikaji lebih mendalam sehingga dicapai kesetaraan siapa menghasilkan apa, atau siapa berkontribusi apa. Dalam penekanan Ahimsa Putra, dunia ini tetap membutuhkan atau dikonstruksikan oleh *female and male*. Dalam tataran oposisi binner, dunia tetap terdiri terbagi antara perempuan dan laki-laki. Dalam kesenian ludruk misalnya, jika tidak ada pemain perempuan maka laki-laki akan memerankan peran perempuan. Oleh karena itu dunia perempuan harus ada. Dalam ludruk, laki-laki memerankan perempuan. Artinya ada dunia perempuan, tapi terkadang yang dipertontonkan perempuan dan di lain waktu laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Maka dari itu harus dibedakan antara ideologi oposisi binner perempuan dan laki-laki, serta realitas laki-laki yang memerankan peran perempuan, tetapi dalam tingkatan ide pemain itu adalah perempuan. Oposisi binnernya tetap antara laki-laki dan perempuan. Artinya tetap harus ada dunia *male and female* (Ahimsa Putra, 13 Oktober 2019).

Seperti halnya wilayah lain di tanah Jawa, masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Bagelen juga menghadapi situasi kuatnya tradisi lokal yang dekat dengan kepercayaan pra-Islam. Toleransi yang terbentuk terhadap kondisi tersebut bukan dalam bentuk kesenian sebagai hiburan, bukan pula sebagai bentuk peribadatan. Peran Walisongo untuk berdakwah menyebarkan Islam di tanah Jawa melalui kesenian wayang kulit atau wayang golek, adalah upaya agar Islam mudah diterima di kalangan masyarakat ketika itu. Studi Graaf (dalam Olivier Johannes Raap, 2015 : xx) menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sekularisasi kesenian lama karena kesenian lokal kemudian berkembang sebagai materi pertunjukkan saja, bukan sebagai ritual agama lokal yang sangat kuat.

Adapun perkembangan Islam di wilayah Bagelen terutama lebih menonjol di kawasan pesisir selatan Jawa. Toleransi Islam terhadap praktik-praktik tradisi sebelum Islam masuk di wilayah Bagelen diwujudkan dengan masuknya syiar keagamaan dalam wayang kulit, kesenian *dolalak* di Purworejo diiringi lagu tradisional dan *sholawatan*, seni *jamjaneng*, dan rebana di Kebumen yang menggabungkan seni tradisional dan Islam. Dalam konteks demikian, keterlibatan perempuan dalam syiar keagamaan dalam kesenian tradisional masyarakat Bagelen sangat kurang diketahui oleh publik. Narasi-narasi yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sama pentingnya dengan laki-laki, dalam mendengarkan sholawat, menyanyikan lagu-lagu Islami melalui seni *jamjaneng* maupun rebana, sangat jarang diketahui dan ditempatkan oleh publik sebagai bentuk keterlibatan perempuan yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam mensyiarkan Islam.

Dalam perkembangan agama Islam, seringkali perempuan seolah tidak hadir untuk mengembangkan dan mewariskan agamanya. Ketika publik menempatkan figur besar, seorang Kyai misalnya yang mengajarkan agamanya, maka proses pengajaran dan mewariskan tidak akan dapat terjadi tanpa peran perempuan, yaitu Nyai. Sayangnya memang deskripsi mengenai hal tersebut sangat sedikit. Dalam pandangan Ahimsa, ini adalah masalah *politics of representation*, yang mungkin tidak secara terencana meminggirkan perempuan, namun dalam praktiknya secara tidak langsung telah meminggirkan peran-peran perempuan. Oleh karena jika cara pandang berbasis sistem yang dikembangkan maka di situ kontribusi perempuan dalam mengembangkan agama akan terlihat dan diakui. Dalam konteks yang sama, jika sejarah tentang keraton hanya berkutat soal raja dan kekuasaannya, maka sistem politik keseluruhan tidak terdeskripsikan. Demikian pula bagaimana peran perempuan. Maka dari itu penulisan sejarah seharusnya juga

mengikutsertakan sistem dan konteksnya, tidak untuk menenggelamkan suatu tokoh, namun justru ingin mendeskripsikan lingkungan, konteks, dan sistem yang ada disekelilingnya.

Penulisan sejarah dengan cara pandang yang berbeda secara mainstream cara pandangnya, tentu diharapkan melengkapi deskripsi sejarah. Temuan-temuan yang berbeda diharapkan memberi warna yang berbeda dan deskripsi yang dihasilkan menjadi deskripsi yang utuh. Deskripsi yang lengkap akan menghasilkan temuan-temuan baru yang menunjukkan tidak ada kebenaran tunggal. Karena jika tidak demikian, selamanya sejarah akan terus meneruskan diceritakan oleh siapa yang dominan, dan itu paling banyak adalah laki-laki. Cara pandang tunggal akan menjadikan cara pandang yang dogmatis, dan disinilah fungsi dialektis dari para intelektual untuk mengembangkan banyak sudut pandang dalam memahami realitas, sehingga tersaji studi yang komprehensif dan berimbang.

5.4. Luaran yang Dicapai

2019	Buku hasil penelitian (buku monograf)	Terbit	“Perempuan dan Kekuasaan dalam Tradisi Jawa Pinggiran” (Unsoed Press, 2019)
2019	Seminar Internasional (prosiding terindeks scopus)	Proses penerbitan	“Local Policy Initiatives To Maintain Java-Bagelen Culture: The Absence Of Woman Issues” International Conference On Contemporary Social and Political Affair (ICoCSPA) FISIP Unair 2019
2019	Jurnal internasional terindeks Kritika Kultura	Submit	“Women of Peripheral Javanese Tradition: A Nearly-Abandoned Inspiration” (Ateneo de Manila University
2019	Seminar Nasional LPPM	LOA	“Ketika Perempuan (Dianggap) Mendominasi: Kajian Feminis tentang Nyai Bagelen”

2018	Seminar Internasional	Sudah dilaksanakan	International Conference On Politics And International Studies 2018 Centre For The Promotion Of Knowledge And Language Universiti Sabah Malaysia “Inquiring into Local Values of Peripheral Javanese Cultural Diversities to Support Democratization”
2018	Keynote speaker	Sudah dilaksanakan	Seminar Nasional “Historiografi Baru Dalam Sejarah Peradaban Islam Indonesia” Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya “Peminggiran Perempuan Dalam Narasi Sejarah Islam, Politik, Dan Kebudayaan Di Indonesia”
2018	Seminar Nasional LPPM	Sudah dilaksanakan	Partisipasi Politik Perempuan Dalam Masyarakat Jawa Bagelen

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejauh ini upaya pemerintah daerah untuk merawat kebudayaan lokal Bagelen sudah menunjukkan inisiasi yang positif dan menyasar budaya takbenda dan yang bersifat kebendaan. Namun upaya merawat budaya tersebut belum disertai perhatian pemerintah daerah berupa penggalian nilai-nilai lokal masyarakat Bagelen. Penggalian tersebut penting dilakukan mengingat kebudayaan juga mencakup aspek nilai dan perilaku bukan hanya warisan takbenda dan kebendaan. Penggalian terhadap nilai-nilai lokal akan mendorong adanya pengakuan terhadap kontribusi perempuan lokal dalam menjaga tradisi Bagelen. Kelak diharapkan eksistensi perempuan sebagai penjaga tradisi budaya juga ikut terdorong untuk diakui kontribusinya. Sebab perempuan lah, tarian dolalak yang menjadi ikon masyarakat Bagelen, dapat berkembang pesat.

Nyai Bagelen merupakan perempuan yang memiliki karakter menonjol, dan dalam dirinya memiliki *power*, dan seharusnya dilihat dari sisi yang positif, bukan hanya karena ditakuti atau takut kwalat saja. Ahimsa menekankan bahwa segala sesuatu dalam perkembangan masyarakat tergantung pada siapa menulis apa. Para sejarawan paling banyak menulis para tokoh yang populer saja. Dalam hal ini, mungkin Nyai Bagelen sebagai pemimpin masa lalu juga tidak diakui sebagai perempuan tangguh. Keberadaanya sebagai pemimpin di wilayah Jawa pinggiran semakin tidak menempatkannya diakui dalam perkembangan sejarah masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki dan tokoh-tokoh yang populer saja. Bahkan penulis sejarah juga paling banyak diisi oleh tokoh-tokoh laki-laki. Oleh karena itu terdapat reduksi tentang kontribusi Nyai Bagelen, hanya sebatas sakti dan bertuah, namun tidak banyak dikenal oleh publik mengenai kemampuan dan ketokohan Nyai Bagelen sebagai pemimpin politik yang juga mampu dalam hal pengembangan industri dan pertanian.

Tari dolalak menjadi seni budaya khas masyarakat Bagelen yang semakin berkembang ketika dimainkan oleh perempuan. Sejahter pandangan yang berkembang karena penari perempuan menjadikan penonton dan suasana menjadi lebih meriah jika dimainkan perempuan. Sisi pandang yang berbeda jika mungkin yang mengelola dolalak adalah seorang perempuan maka tafsir yang muncul mungkin “lebih memihak” bahwa perkembangan dolalak adalah campur dan buah tangan dari figur-figur perempuan yang bekerja keras untuk selalu menari dan melestarikan dolalak. Cara-cara pandang yang demikian yang perlu ditekankan, yaitu kemampuan penulis sejarah dari sudut pandang mana, hal tersebut yang menentukan ia akan mengungkap narasi-narasi yang selama ini tersembunyi. Penulisan sejarah dengan cara pandang yang berbeda secara mainstream cara pandangnya, tentu diharapkan melengkapi deskripsi sejarah. Temuan-temuan yang berbeda diharapkan memberi warna yang berbeda dan deskripsi yang dihasilkan menjadi deskripsi yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adji, Khrisna Bayu. 2013. *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Anderson, Benedict, 1991. “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa”, dalam Mirriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Budianta, Melani, “ Pendekatan Feminis terhadap Wacana”, dalam Aminuddin (ed.), 2002. *Analisis Wacana dari Linguistik sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Kanak.
- Carey, Peter, Hoube, Vincent. 2016. *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*, Jakarta : Gramedia.
- Carey, Peter. 2017. *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dachlan, Rangga. “Indonesia’s Implementation of Inventory Obligation under UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention: Problems in the Online Inventories,” *International Journal of Cultural Property*, 22 (01) 131-151 doi: 10.1017/S0940739115000041.
- Data Benda Cagar Budaya Bagelen*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Purworejo : tanpa tahun.
- Geertz, Clifford, 1992. *Tafsir Kebudayaan*, terjemahan Budi Susanto, Yogyakarta : Kanisius.
- Harrison, Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik* terjemahan Tri Wibowo, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- https://krjogja.com/web/news/read/61036/Pemkab_Purworejo_Register_156_Cagar_Budaya 21 Maret 2018 diakses 17 Januari 2019
- <http://purworejo.sorot.co/berita-5072-dewan-kesenian-purworejo-bakal-terus-kawal-kebijakan-pemerintah.html> 15 Maret 2018 diakses 17 Januari 2019
- Heru Santosa, Jarot, 2013. “Seni Dholalak Purworejo Jawa Tengah: Peran Perempuan dan Pengaruh Islam dalam Seni Pertunjukkan” *Jurnal Kawistara* Vol 3 No.3.
- Idham Bachtiar Setiadi, 2017. “Warisan Budaya, Sikap Ilmiah, dan Kritik Kebudayaan”, dalam *Mengelola Cagar Budaya, Merawat Peradaban*, Prisma Vol. 36. No.2, Jakarta : LP3ES.

- Iwahara, Hiroi. 2009. "Heritage Tourism and Cultural Policy in Indonesia : The Impact of National Culture on Tourism Development in Borobudur", *Japanese Review of Cultural Anthropology*, Vol 10 29-41 https://doi.org/10.14890/jrca.10.0_29
- Jatmiko, Ageng Purwo, 2012. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai Kearifan Lokal*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jones, Ted. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta : KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Johannes Raap, Oliver 2015. *Soeka Doeka Djawa Tempo Doeloe*, Jakarta : Gramedia.
- Kangas, Anita, Duxbury, Nancy, De Beukelaer Christian, "Introduction: Cultural Policies for Sustainable Development", *International Journal of Cultural Policy*, 23(2):129-132 March 2017 DOI: 10.1080/10286632.2017.1280790.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta : LP3ES.
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia.
- Magnis Suseno, Franz, 1984. *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Neuman, Lawrence, 1994. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approachs*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pamberton, John, 2003. *Jawa on The Subject of Java*, Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Pangastoeti, Sri, "Perempuan yang Terpinggirkan dalam Penulisan Sejarah", dalam Siti Hariti. 2009. *Gender and Politics*, Yogyakarta: PSW UGM.
- Perda No. 1 Tahun 2019 tentang *Perubahan dan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo*, Purworejo : Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- Permadeli, Risa, 2015. *Dadi Wong Wadon, Representasi Sosial Perempuan di Era Modern*, Jakarta: Ifada.
- Philcher, Jane, Whelehan, Imelda, 2004. *50 Key Concepts in Gender Studies*, London : Sage Publication.
- Robinson, Helena, 2018. "Cultural Policy, Local Government and Museums: An Australian Perspective", *Journal Local Government Studies* Vol 44 (5), p. 719-738. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1488688>

- Salimah, 2007. *Peran Tari Dolalak dalam Penyebaran Agama Islam Di Desa Kaliharjo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
- Samuel, Hanneman dan Schult Nordholt, Henk, 2004. *Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region and Crisis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Schele, Judith. "Cultural Politics of Representation in Contemporary Indonesia," *European Journal of East Asian Studies*, Vol 10 (2) 1 January 2011
<https://doi.org/10.1163/156805811X616093>.
- "Sejarah Purworejo", [http: www.purworejokab.go.id](http://www.purworejokab.go.id) diakses 17 Januari 2019
- Setyawan, Agus Budi. "Kesenian Dolalak sebagai Brand Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah", *Jurnal KalaTanda*, Vol. 1 No. 2 Desember 2016, 113-124.
- "Sejarah Purworejo", [http: www.purworejokab.go.id](http://www.purworejokab.go.id) diakses 26 Mei 2017.
- Silva, Santos Augusto, Babo, Elisa Perez, Guerra, Paula, 2013, "Cultural Policies and Local Development: The Portuguese Case", *Portuguese Journal of Social Science*, Vol 12 (2) doi: 10.1386/pjss.12.2.113_1
- Shiva, Vandana, 1997. *Bebas dari Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet, 1990. *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory Procedur and Techniques*. Beverly Hills, SA: Sage Publications.
- Wawancara dengan Prof. Irwan Abdullah, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, tanggal 4 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Prof. Shri Heddy Ahimsa Putra, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 13 Oktober 2019.
- Woodward, Katryn, 1997. *Identity and Difference: Culture, Media and Identities*. London : Publication.

LAMPIRAN

- 1. DOKUMENTASI KEGIATAN**
- 2. COVER BUKU MONOGRAF DAN DAFTAR ISI**
- 3. SERTIFIKAT SEMINAR INTERNASIONAL 2019 DAN ARTIKEL**
- 4. LOA SEMINAR LPPM 2019 DAN ARTIKEL**
- 5. SUBMIT JURNAL INTERNASIONAL DAN ARTIKEL**
- 6. SERTIFIKAT INVITED SPEAKER SEMINAR NASIONAL DAN ARTIKEL**

Wawancara dg Perangkat Desa dan Pengelola Kesenian Desa Kaliharjo, 28 Agustus 2019



Wawancara dengan Kepala Desa sekaligus Budayawan Desa Bagelen, 13 Agustus 2019



Wawancara dg Prof. Shri Heddy Ahimsa Putra Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM



Buku Monograf

Sofa Marwah
Soetji Lestari
Tri Rini Widyastuti
Osni Wigarti



PEREMPUAN — DAN — KEKUASAAN DALAM TRADISI JAWA PINGGIRAN

Buku Monograf

**PEREMPUAN DAN KEKUASAAN
DALAM TRADISI JAWA PINGGIRAN**

© 2019 Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Kesatu, September 2019
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Penulis:

Sofa Marwah, Soetji Lestari, Tri Rini Widyastuti, Osni Wigarti

Editor Isi:

Dr. Dyah Retna Puspita, M.Hum.

Editor Bahasa:

Siti Junawaroh, M.Hum.

Desain sampul: UNSOED Press

Foto sampul: myimage.id

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)
Telp. (0281) 626070
Email: unsoedpress@unsoed.ac.id



Anggota

Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Nomor : 003.027.1.03.2018

ix + 75 hal., 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-7144-35-9

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit,
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak,
photoprint, microfilm dan sebagainya.*

PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas tersusunnya buku monograf yang berjudul *Perempuan dan Kekuasaan dalam Tradisi Jawa Pinggiran* ini. Buku monograf ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim penulis di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen, sebagai representasi masyarakat Bagelen. Pemetaan budaya Bagelen mengacu pada penelitian fenomenal Keoentjaraningrat (1984) yang menyajikan berbagai variasi kebudayaan Jawa. Dalam konteks pemetaan kebudayaan tersebut, Bagelen menempati posisi sebagai *mancanegara kulon* bila dilihat dari skema *negarigung* yang menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan Jawa.

Kajian mengenai kontribusi perempuan seiring perubahan kekuasaan sebuah kelompok masyarakat menjadi menarik karena seringkali perempuan tidak tampak mewarnai atau berkontribusi dalam perjalanan masyarakat tersebut. Pengetahuan-pengetahuan yang muncul dan berkembang di masyarakat seringkali diisi oleh penguasa yang didominasi laki-laki ataupun dari kalangan lapisan masyarakat atas. Adapun budaya Bagelen sebagai pinggiran budaya Jawa sesungguhnya mengandung nilai-nilai yang lebih egaliter dan terbuka dibanding dengan budaya Jawa yang feodalistik. Dalam hal pelapisan masyarakatnya juga kurang memiliki strata sosial yang tegas memisahkan antara lapisan atas dan lapisan atas. Antara lain hal tersebut tercermin dalam penggunaan bahasa yang berkembang di masyarakat Bagelen, baik di Purworejo maupun Kebumen. Budaya Bagelen adalah budaya peralihan budaya Jawa dari arah timur dan peralihan budaya Banyumas dari arah Barat. Budaya Banyumas, adalah variasi budaya Jawa yang lain.

Dalam konteks budaya masyarakat yang demikian itu, masyarakat Bagelen memiliki nenek moyang yang dikenal luas sebagai Nyai Bagelen. Sayangnya, sumber mengenai Nyai Bagelen merupakan tradisi verbal, bukan prasasti atau babad. Dari berbagai versi yang ditemukan mengenai ketokohan Nyai Bagelen, narasi yang ada menunjukkan kemampuan Nyai Bagelen sebagai penjaga tradisi budaya, sekaligus mampu menjadi pemimpin, menjadi pelaku industri, pengelola pertanian, pemelihara wangsa, dan penjunjung agama. Sayangnya

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Argumen Teoretis.....	6
1.3. Metode Penelitian	9
BAB 2. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT BAGELEN	11
2.1. Karakteristik Wilayah Purworejo dan Kebumen	11
2.2. Profil Kependudukan Purworejo dan Kebumen	12
2.3. Potret Pendidikan Masyarakat Purworejo dan Kebumen	17
2.4. Masyarakat Purworejo dan Kebumen dalam Sketsa Kehidupan Ekonomi	21
BAB 3. PROFIL PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER	25
BAB 4. PERKEMBANGAN SOSIAL DAN POLITIK DI WILAYAH BAGELEN	31
BAB 5. KEBUDAYAAN BAGELEN	39
5.1 Budaya Lokal dan Ketokohan Nyai Bagelen	39
5.2 Kontestasi Budaya Lokal dan Perkembangan Agama di Wilayah Bagelen	47
BAB 6. KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM PERJALANAN MASYARAKAT BAGELEN	59
BAB 7. PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA.....	73
	vii



International Conference
On Contemporary Social And Political Affair (ICoCSPA) 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya
Email: icocspa@fisip.unair.ac.id
Website : <http://icocspa.fisip.unair.ac.id>



Letter of Acceptance

Dear Author(s): Sofa Marwah

We are pleased to inform you that your abstract entitled:

**"LOCAL POLICY INITIATIVES TO MAINTAIN JAVA-BAGELEN CULTURE:
THE ABSENCE OF WOMAN ISSUES"**

has been reviewed and accepted to be presented at ICoCSPA 2019 to be held on 17 July 2019 in Surabaya, Indonesia.

Please submit your full paper via website and make the payment for registration fee* before the deadlines. Should you require further information, please kindly visit our website <http://fisip.conference.unair.ac.id/> or contact us on email at icocspa@fisip.unair.ac.id.

Thank You.

Best Regards,

Prof. Dr. Emy Susanti, MA.
ICoCSPA 2019 Chairperson

*) Registration fee:
Non-Student Presenter Rp 1.750.000
Student Presenter Rp 1.250.000
ASWGI Member Rp 2.450.000



International Conference
On Contemporary Social And Political Affair (ICoCSPA)2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl.Airlangga 4-6, Surabaya
Email: icocspa@fisip.unair.ac.id
Website : <http://icocspa.fisip.unair.ac.id>



RECEIPT

Receipt date : July 25, 2019
Submission : 28
Number

We have received the payment for full paper publication on Proceeding Indexed by Scopus from:

Name : Sofa Marwah
Email : sofamarwah75@gmail.com
Institution : Universitas Jenderal Soedirman

Category	Amount (IDR)
1. Publication on Proceeding Indexed by Scopus	2.500.000
TOTAL	2.500.000

Payment Details:

Bank : MANDIRI
Account Number : 1420017508424
Account Name : SUTINAH

Best Regards,

Ratna Azis Prasetyo, S.Sos., M.Sosio.
Financial Coordinator

LOCAL POLICY INITIATIVES TO MAINTAIN JAVA-BAGELEN CULTURE: THE ABSENCE OF WOMAN ISSUES

Sofa Marwah

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: sofamarwah75@gmail.com

Abstract:

The era of decentralization has opened up vast spaces for local governments in Indonesia to develop local culture. In Purworejo Regency, Central Java Province, women have an important contribution in preserving customs and tradition. This paper aims to examine whether the Government of the Purworejo Regency in developing local cultural policies has given recognition to the contribution of women in maintaining customs and culture. This paper is a qualitative study involving informants from local cultural figures and the Culture and Tourism Office of Purworejo Regency. The results of the study show that local governments have developed local cultures that are intangible and material, such as various art festivals and inventorying cultural heritage. However, the effort to develop the culture does not include extracting local cultural values, called Bagelen culture. Besides, these development efforts have not yet acknowledged the contribution of women in maintaining the Bagelen tradition. Thus, the policy of developing a local culture in Purworejo Regency is still gender-neutral, although women play an equally important role with men in maintaining their customs and tradition. Therefore, special attention is needed from the local government to explore the cultural values of the arts, thereby encouraging recognition of the role of women in maintaining their customs and culture.

Keywords: women, contribution, culture, Bagelen, policy

INTRODUCTION

Throughout the power of the New Order, Javanese culture was dominant as the focus of experts' study. The phenomenal study of Anderson (1991) and Pamberton (2003), for instance, revealed a reflection of New Order's dominance which practiced Javanese power tradition. The Javanese culture in this context refers to Solo and Yogyakarta Palace as the center. When the New Order fell, there was a shift from the dominance of Javanese culture to the rise of regional issues. Similarly, in terms of study focus, the shift occurs in which the experts show more interest in investigating local culture. Hanneman and Nordholt's (2004: 2) study recorded that the rise of identity politics based on localities, women group, religion and ethnic are dominant in the reform era marked by the rise of demands from groups such as women, sharia regulations, customary regulations, religious fundamentalist movements, and so on. In regards to this, the Jones study (2015: 317) showed that the most pivotal issue in the reform era is the development of ethnic identity politics and initiatives for cultural policy in terms of decentralization policies.

Referring to the results of the Jones study (2015), this study aims to examine the initiation of regional cultural policies in fostering Javanese culture; to what extent it recognizes women contributions. The peripheral Javanese culture in this context is Bagelen culture (Koentjaraningrat, 1984). The wider

community may not know Bagelen culture, even though it is located not far from the center of Javanese culture. It might be so since the Bagelen community is not the experts' main focus of study. Thus, when decentralization policies develop, it is important to examine the socio-cultural situation in the peripheral areas, such as the Bagelen community, which previously did not receive much attention from the experts.

In the context of decentralization policy, the commitment of local governments to treat regional culture through policy is crucial. The government is the party that funds cultural management and development. For this reason, cultural affairs cannot be separated from the state. The study from Silva et al (2013), shows that the role of local government and local culture becomes two inseparable flows. But whether the role of the local government has given recognition to the contribution of women in maintaining customs and traditions or prevailing cultural development policies is still neutral, this study aims to answer them.

RESEARCH METHOD

As a qualitative study, this study constructs social reality (Neuman, 1994: 4) related to the initiation of local cultural policies in maintaining Bagelen culture and the extent to which these initiatives include women contributions. Bagelen culture in this study includes Purworejo District. Koentjaraningrat (1984: 25-27), on Javanese culture, puts Bagelen as a variant of Javanese culture which covers the southwest Central Java region. The main area of Bagelen includes Purworejo Regency in Central Java Province although it is not administrative boundaries. Research informants were selected starting from one particular informant and went further to the next informant (Harrison, 2007: 25), including historical and cultural figures of Bagelen and the ranks of the Purworejo Regency Culture and Tourism Office. Data were collected through in-depth interviews, content analysis, and observations. In addition, the data were gathered from the Culture and Tourism Office, the local government websites, research scientific journals, and other relevant sources. The author then conducts the analysis by building an analytical framework using the relevant theory building. The full results of the analysis along with important findings are presented in this article.

RESULT AND DISCUSSION

The meaning of culture is influenced by power relations involving many actors, with a series of values and interests of actors who have different levels of power (Abdullah, 2009: 2). At this degree, the strong representation of Javanese culture in the practice of New Order power such as the study of Anderson (1991), Pamberton (2003), and Jones (2015) becomes perceivable. It means that the meaning of culture at that time was supported by so many actors from various hierarchies by bringing the same values and interests, related to the dominance of Javanese culture and shared goal of strengthening the regime.

One of the media to instill the dominance of central Javanese culture during the New Order was through merging culture and education affairs under the same ministry, the Ministry of Education and Culture. When the reform took place, educational and cultural affairs were separated. The field of culture is then integrated with tourism. The field of culture is included in tourism instead. Lately, nevertheless, tourism affairs are under the Ministry of Tourism while the cultural affairs conjoin primary and secondary education. This is in line with the results of a study from Schlehe (2011) which shows that when the reform took place in Indonesia, there was a need to re-understand the policies for managing and developing ethnic-cultural diversity.

Along with the decentralization policy, cultural management varies based on regional needs. Robinson's study (2018) sees cultural management by local governments as a form of "municipalization of culture", where local governments are responsible for managing culture as well as funding. In Purworejo District, until now, cultural affairs and tourism affairs merge. Referring to Perda No. 14 of 2016 on the Establishment and Composition of Regional Equipment of Purworejo Regency, the Office of Tourism and Culture (Disbudpar) has the duty to administer government affairs in terms of tourism and culture, in accordance with regional authority including culture, tourism destination development, and capacity development and promotion.

In line with the decentralization policy, the shift in cultural management is also followed by the role of cultural management by local arts councils, local museums, or cultural parks. At present Purworejo Regency already has the Purworejo Arts Council (DKP). The local museum in Purworejo is called Tosan Aji Museum. Furthermore, Cultural Park developed in Purworejo is called Purworejo City Park. In Schlehe (2011) study, it stated that cultural theme parks are part of the public space to carry out innovative visions related to globally orient cultural identity, within the framework of cultural diversity in Indonesia.

The involvement of DKP in implementing the Disbudpar policy program is pivotal for coloring Purworejo cultural preservation through regional arts. Kangas et al. (2017: 129) stated that the actor's role is to revitalize new roles for cultural actors to care for culture including art, the past legacy, socio-cultural activities, and the potential to change the politics of cultural policy.

The Bagelen art brand is Dolalak Dance. At present, there are approximately 50 Dolalak dance groups. Dolalak dance is played by women who act like Dutch soldiers during the war. The contribution of women in maintaining this tradition makes Dolalak dance continues to grow. Santosa's study (2013, 227-234), shows that in maintaining traditions in dolalak art, women become formidable figures. Women are "mother earth" who are attached to fertility, exemplary figures and are able to maintain traditional community values and norms.

The study from Setyawan (2016, 118-119) noted that the local government efforts to develop the existence of Dolalak dance including the performance of Dolalak dance in commemoration of national holidays, regular performances at the Regional Arts Building, welcoming guests, attending various art events, the establishment of Kaliharjo Village as the center of Dolalak dance and tourist village, even Dolalak dance has also received patent rights in 2011. However, it remains forgotten that it is the women who have an outstanding contribution to the development of the dance. Accordingly, the regional governments shall pay special attention to women life who contributed the most to the Dolalak tradition.

The Collaboration of DKP and Disbudpar has also contributed to re-linking the ties of local communities to past livelihoods. For example. It is found in the performance of Bumi Kayu Arahiwang art, an effort to remember and appreciate the forerunner of the birth of Purworejo, as recorded in the Boro inscription on Bumi Kayu Arahiwang in the year 901 of the Ancient Mataram period as well as in organizing the Bogowonto Festival and the Indonesian independence ceremony on the banks of the Bogowonto river. As is known, the Bogowonto River was vital for Bagelen people in the past. Due to its high fertility, Many local people relied on their income from farming on the banks of the river.

The efforts of the Purworejo District Government to preserve art and culture are also reflected in the Purworejo 2020 Romance program initiated by the Regent of Purworejo, Agus Bastian. Some other annual cultural events include Pengetan Jumenengan, Gebyar Muharram, Sawunggalih Art Festival and Culinary Festival. Pengetan Jumenengan is a traditional festival commemorating the appointment of the Duke of RAA Cokronegoro I who was the first regent of Purworejo since the name changed from Brengkelan to Purworejo on February 27, 1831. In 2019, the traditional festival of Pengetan Jumenengan was the first to mark the new Purworejo Anniversary namely February 27, 1831. The information about these changes can be read in Carey (2017).

Furthermore, Gebyar Muharram is a festival influenced by Islamic values and traditions to commemorate the Islamic New Year while Sawunggalih Art Festival features a local dance parade. Sawunggalih is actually the name of Kutoarjo regent. At present Kutoarjo is one of the sub-districts within the Purworejo Regency. Furthermore, the Culinary Festival is a festival of food and traditional snacks for the people in the area (sorotpurworejo.com, March 15, 2019).

Of course, the presence of the state plays a pivotal role in sustaining cultural preservation. The presence of the state to treat regional culture can also affirm the state exists as a protector in building its civilization. In this context, the state takes a position as a cultural preserver. Yet in the view of Giddens, as quoted in Abdullah (2009: 5), the state can also make a pattern of the power relations that are formed. Culture will not be separated from the space in which the culture is formed, maintained or otherwise, changed. This means that the state presence to treat culture is important as long as its presence does not eliminate the indigenous characteristics of the local culture. The presence at the same time also has the potential to reconcile the pattern of new power relations at the regional level.

Further, in preserving other cultural elements, the collaboration between Disbudpar and DKP has not given special recognition to the women contribution. The performance of Bumi Kayu Arahiwang to commemorate the forerunner of Purworejo, for example, applies neutrally as an effort to maintain culture only. Similarly, the Bogowonto Festival, Romansa Purworejo, Pengetan Jumenengan, Gebyar Muharram, Sawunggalih Art Festival and Culinary Festival.

The efforts of Disbudpar and DKP to organize various festivals as intangible cultural heritage are certainly positive since Indonesia as a member of the Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO does not yet have an Intangible Cultural Heritage Act (Dachlan, 2015). At the local government level, the efforts are realized in organizing various festivals such as the Bumi Kayu Arahiwang Performing Arts, Bogowonto Festival, Pengetan Jumenengan, Romansa Purworejo, Gebyar Muharram, Sawunggalih Art Festival, and Culinary Festival.

Moreover, the local governments also pay attention to material culture. At the national level, the policy related to cultural heritage is Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage. Yet, Purworejo does not have a regional policy that is more operational and regional to protect cultural heritage. Until 2018, there are no specific policies such as regional regulations governing the protection of cultural heritage objects. The Jatmiko study (2012) also shows that until 2012, Purworejo administration had not optimally carried out the preservation of cultural heritage objects.

However, Purworejo Disbudpar has tried to manage cultural heritage by enlisting a portion of cultural heritage and entering it into the Tosan Aji Museum despite its fund shortages. Until March 2018,

Disbudpar managed 156 cultural reserves scattered in various corners of the Purworejo area. It is believed that the number of cultural reserves in the form of buildings and historic objects found in Purworejo Regency amounts to thousands (krjogja.com, March 21, 2018). The thing done by the Ministry of Culture and Tourism of Purworejo Regency was able to fill the void of regional regulations regarding the protection of cultural heritage. This means that when there is no regional policy regarding the protection of cultural heritage, the existence of a list of cultural heritage inventories can answer the preservation needs of heritage.

Viewing the policy steps of the local government above, it seemingly still less touches on aspects of strengthening local cultural values, in this case, the Bagelen culture. Koentjaraningrat (1985: 5) states that culture also concerns values and behavior. Since the reformation took place, the local government policies related to cultural preservation included the establishment of regional arts councils which held staging arts and festivals, regional museums and cultural parks. When referring to Jones' study (2015: 12-18), the emphasis on culture into art was due to policies implemented throughout the New Order's rule.

The state presence through the policies implemented has made a different understanding of prevailing cultural practices. Of course, various policies supporting local culture are not insignificant to preserve local culture. Yet if these efforts are accompanied by various studies or forums to strengthen the excavation of the Bagelen local values, it will certainly be more comprehensive. Reflections on the social values of the ancient society to support the cultural preservation of the present certainly not only through a culture that is material and intangible. Rather, the inheritance of generation to generation also involves how values and behaviors that spread goodness. Local values also need to be the foundation for the lives of future generations.

All in all, it appears that the process of initiating cultural preservation and development is a long and inseparable decision-making process from the practice of past power. As a peripheral community, local cultural observer, Sukoso, even mentioned that the Bagelen community had lost its identity since the Dutch colonial administration. Thus, policy initiation to treat the order of local culture is not an easy effort to do; it takes a long time and great energy to explore the whole aspects of the local cultural order. The effort was also an attempt to reaffirm the Javanese cultural identity which had always been eroded by central Javanese culture. Later in time, efforts to explore Bagelen's local cultural values will also encourage recognition of the extraordinary contributions of local women in maintaining local customs and culture.

CONCLUSIONS

The decentralization policy has opened wide opportunities for local governments to preserve local culture. In this case, there is only a commitment from the local government to encourage the broadest range of government and society to maintain their own traditions and culture. In this context, the policy of the Purworejo Local Government to treat Bagelen traditions and culture has developed adequately. So far the efforts of the local government to treat local culture have shown positive initiation and targeted intangible and material culture. However, the effort has not been accompanied by the attention of the regional government in the form of extracting local values from the Bagelen community. The excavation is important because culture also includes aspects of values and behavior, not just intangible heritage and material. Excavations of local values will encourage recognition of the contribution of local women in maintaining the Bagelen tradition. In this case, it is necessary to develop scientific forums that encourage

the exclusion of local cultural values. It is expected that the existence of women as guardians of cultural traditions will also be encouraged to be recognized for their contribution.

REFERENCES

- Abdullah, Irwan, 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anderson, Benedict, 1991. "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa", in Mirriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Carey, Peter. 2017. *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dachlan, Ranga. "Indonesia's Implementation of Inventory Obligation under UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention: Problems in the Online Inventories," *International Journal of Cultural Property*, 22 (01) 131-151 doi: 10.1017/S0940739115000041.
- Data Benda Cagar Budaya Bagelen*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Purworejo : no year.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- https://krjogja.com/web/news/read/61036/Pemkab_Purworejo_Register_156_Cagar_Budaya 21 Maret 2018 accessed on 17 January 2019
- <http://purworejo.sorot.co/berita-5072-dewan-kesenian-purworejo-bakal-terus-kawal-kebijakan-pemerintah.html> 15 March 2018 accessed on 17 January 2019
- Jatmiko, Ageng Purwo, 2012. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai Kearifan Lokal*. Yogyakarta State University.
- Jones, Ted. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta : KITLV and Yayasan Obor Indonesia.
- Kangas, Anita, Duxbury, Nancy, De Beukelaer Christian, "Introduction: Cultural Policies for Sustainable Development", *International Journal of Cultural Policy*, 23(2):129-132 March 2017 DOI: 10.1080/10286632.2017.1280790.
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia.
- Newman, Lawrence, 1994. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approachs*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pamberton, John, 2003. *Jawa on The Subject of Java*, Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Robinson, Helena, 2018. "Cultural Policy, Local Government and Museums: An Australian Perspective", *Journal Local Government Studies* Vol 44 (5), p. 719-738. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1488688>
- Samuel, Hanneman dan Schult Nordholt, Henk, 2004. *Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region and Crisis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Santosa, Jarot Heru, 2013. "Seni Dholalak Purworejo Jawa Tengah: Peran Perempuan dan Pengaruh Islam dalam Seni Pertunjukkan", *Jurnal Kawistara* Vol 3 No.3.p. (227-241).
- Schele, Judith. "Cultural Politics of Representation in Contemporary Indonesia," *European Journal of East Asian Studies*, Vol 10 (2) 1 January 2011 <https://doi.org/10.1163/156805811X616093>.
- Setyawan, Agus Budi. "Kesenian Dolalak sebagai Brand Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah", *Jurnal KalaTanda*, Vol. 1 No. 2 December 2016, 113-124.
- Silva, Santos Augusto, Babo, Elisa Perez, Guerra, Paula, 2013, "Cultural Policies and Local Development: The Portuguese Case", *Portuguese Journal of Social Science*, Vol 12 (2) doi: 10.1386/pjss.12.2.113_1.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Dr. Soeparno Grendeng, Purwokerto 53122
Telp (0281) 625739, 634519 Fax (0281) 6257739;
Website: <http://www.lppmunsoed.ac.id>; email: lppm_unsoed@yahoo.co.id

No. : B/7280/UN23.14/PN/2019
Lamp : 1 lembar
Hal : Undangan Pemakalah

Purwokerto, 25 Oktober 2019

Yth. Bapak/Ibu **Dra. Tri Rini Widyastuti, M.Si.**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Dengan Hormat,

Bersama surat ini diberitahukan bahwa abstrak/makalah Bapak/Ibu/Sdr/i yang berjudul **"KETIKA PEREMPUAN (DIANGGAP) MENDOMINASI: KAJIAN FEMINIS TENTANG NYAI BAGELEN"** DITERIMA untuk DIPRESENTASIKAN dalam Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman pada tanggal 19 - 20 November 2019 di Hotel Java Heritage Purwokerto.

Selanjutnya kami mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti Seminar dan mempresentasikan makalah sesuai dengan jadwal terlampir.

Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Panitia,



Poppy Arsil, S.TP., M.T., Ph.D.



6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)

**KETIKA PEREMPUAN (DIANGGAP) MENDOMINASI:
KAJIAN FEMINIS TENTANG NYAI BAGELEN**

Oleh

Tri Rini Widyastuti, Sofa Marwah, Soetji Lestari

Universitas Jenderal Soedirman

e-mail: rini_sukrisno@yahoo.co.id

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan mendeskripsikan posisi perempuan dalam tradisi budaya Bagelen, sebuah tradisi budaya Jawa pinggiran, yang direpresentasikan sosok Nyai Bagelen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber pada legenda, dokumen sejarah, dan didukung hasil wawancara dengan tokoh budaya dan masyarakat Bagelen, serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berbeda dari gambaran umum tentang perempuan Jawa yang dianggap sekadar *kanca wingking* yang selalu menurut, Nyai Bagelen digambarkan sebagai sosok yang dominan: seorang perempuan yang sakti sekaligus istri yang mandiri, pekerja keras, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan tegas, bahkan berani “melawan” suami untuk mempertahankan pendapat, namun tetap setia. Legenda Nyai Bagelen menggambarkan bahwa perempuan yang berdaya dianggap berbahaya. Anggapan bahwa perempuan emosional maka ketika dia memiliki kesaktian yang tinggi justru dianggap sangat potensial merusak dan menghancurkan. Hingga saat ini nama Nyai Bagelen masih lekat dalam ingatan masyarakat Bagelen dan sekitarnya, namun sebatas sebagai sosok yang memiliki kesaktian sehingga makamnya sering dikunjungi masyarakat yang ingin mendapat berkah. Bagi perempuan Bagelen sendiri, sosok Nyai Bagelen tidak menjadi sumber inspirasi, bahkan tak jarang malah membuat mereka merasa malu dan risih karena Nyai Bagelen diidentikkan dengan perempuan berpayudara panjang.

Kata kunci: Nyai Bagelen, perempuan, dominasi, budaya pinggiran

ABSTRACT

This paper aims to describe the position of women in the cultural of Bagelen, a peripheral Javanese cultural tradition, represented by the figure of Nyai Bagelen. This research is a descriptive qualitative research based on legends, historical documents, and supported by interviews with cultural figures and the Bagelen community, as well as academics. The results

showed that different from the general description of Javanese women who were considered merely *kanca wingking* who always obeyed, Nyai Bagelen was depicted as a dominant figure: a woman who was powerful as well as an independent wife, hard worker, had a strong leadership spirit, and was firm, even dare to "fight" the husband to defend opinions, but remain loyal. The legend of Nyai Bagelen illustrates that powerful women are considered dangerous. The assumption that an emotional woman then when she has high supernatural powers is considered to be very potential to damage and destroy. Until now, the name Nyai Bagelen is still firmly in the memories of the Bagelen and surrounding communities, but is limited to a figure who has supernatural powers so that his tomb is often visited by people who want to get blessing. For Bagelen women themselves, the figure of Nyai Bagelen is not a source of inspiration, in fact it often makes them feel embarrassed and uncomfortable because Nyai Bagelen is identified with long-breasted women.

Keywords: Nyai Bagelen, women, domination, periphery culture

PENDAHULUAN

Makalah ini bertujuan mendeskripsikan posisi perempuan dalam tradisi budaya Bagelen, sebuah tradisi budaya Jawa pinggiran, yang direpresentasikan sosok Nyai Bagelen. Nama Nyai Bagelen memang tidak masuk dalam jajaran perempuan-perempuan tangguh penguasa Tanah Jawa (Adji&Achmad, 2018), namun hingga hari ini makamnya masih menjadi “sumber daya politik” bagi banyak pihak, terutama para pemburu kuasa. Sejauh ini sumber historiografi tentang Nyai Bagelen bukan berupa prasasti atau babad, melainkan legenda rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi. Legenda menurut Danadjaja (1984) adalah cerita rakyat yang dianggap sebagai kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi yang ditokohi manusia dengan kekuatan luar biasa dan sering kali dibantu mahluk-mahluk ajaib. Menurut Thomson (2012), pemanfaatan sumber lisan, termasuk legenda rakyat, sebagai sumber penelusuran sejarah dapat dilakukan karena dalam kehidupan masyarakat yang masih berbudaya lisan, sumber tertulis sulit didapatkan.

Salah satu sejarah tentang Nyai Bagelen dihimpun sejarawan Priyadi (2004). Tersebutlah seorang Raja bernama Sri Prabu Kandi Awan yang kemudian wafat dan digantikan putra sulungnya bernama Sri Panuwun. Sri Panuwun memiliki dua orang putra, namun keduanya cacat. Beliau kemudian mendapat wangsit bahwa keinginannya akan terkabul apabila dia bertapa di sebuah sendang di sebelah barat wilayah kekuasaannya selama 40 hari 40 malam. Selesai bertapa, dia mendapat petunjuk. Di situ, tinggal seorang gadis nan rupawan, putri Kyai Somalangu. Keduanya menikah, dan lahirlah Rara Wetan (atau Roro Wetan) yang di kemudian hari dikenal sebagai Nyi Ageng Bagelen atau Nyai Bagelen. Sri Panuwun merupakan salah satu

raja Jawa yang legendaris. Dalam *Babad Tanah Jawi* dia disebut sebagai *ratunipun tiyang tani, adalem wonten ing Pagelen* (rajanya petani yang tinggal di Bagelen). Dalam *Carita Parahiyangan*, raja tersebut bernama Sang Mangukuhan atau Rahyangta Kuli-kuli dan mendapat sebutan Si Peladang atau Si Petani. Dia merupakan keturunan Raja Galuh yang berkuasa pada akhir abad VI.

Menurut legenda, Roro Wetan mewarisi kecantikan ibunya. Banyak pemuda kasmaran dan ingin mempersuntingnya, salah satunya Tumenggung Wingko yang sakti mandraguna. Roro Wetan sempat diculik Tumenggung Wingko, namun berhasil diselamatkan Raden Awu-awu Langit. Kemudian Roro Wetan menikah dengan Awu-awu Langit dan mereka dikaruniai tiga orang putra, yakni Bagus Gentha, Roro Pitrang (atau Roro Pitrah), dan Roro Taker. Ketika ayah mertuanya meninggal, Raden Awu-awu Langit menggantikannya memerintah Bagelen. Roro Wetan dan Awu-awu Langit adalah petani dan peternak yang ulet. Mereka menanam padi, ketan, dan kedelai, beternak sapi dan ayam, juga menenun. Tanah Bagelen subur dan cocok ditanami kedelai, panen pun melimpah sehingga daerah tersebut dikenal sebagai Medang Gelih atau Padelen, yang kemudian disebut Bagelen. Konon, Nyai Ageng Bagelen suka *laku prihatin* dan memiliki kemampuan spiritual tinggi. Perempuan rupawan yang digambarkan berposturnya tinggi besar dan berambutnya panjang terurai ini suka memakai kemben lurik. Ciri fisik lain yang menonjol adalah dia memiliki payudara panjang sehingga jika anak-anaknya hendak menyusui dia tinggal menyampirkannya ke belakang. Ketika dia menenun, payudaranya disampirkan ke belakang agar tidak mengganggu bekerja. Suatu saat, kala sedang asyik menenun tanpa dia sadari datanglah seekor anak sapi yang ikut menyusui. Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata yang menyusui bukan anaknya melainkan anak sapi. Betapa malu dan marahnya Nyai sehingga dia pukul anak sapi itu sampai mati. Dia juga berpesan kepada anak cucunya untuk tidak memelihara sapi. Suatu masa pada hari Selasa Wage terjadi peristiwa yang memilukan. Saat itu musim panen kedelai dan ketan hitam. Nyai sibuk menenun dan suaminya sibuk mengurus panen. Kedua putri mereka yang masih kecil - Roro Pitrang dan Roro Taker - hingga sore belum pulang. Selesai menenun, Nyai mencari keduanya tapi tidak menemukan mereka. Dia lalu bertanya kepada suaminya yang masih asyik mengurus panen, namun jawaban Raden Awu-awu Langit dianggap kurang mengena. Dengan kemarahan yang meluap, dibongkarlah tumpukan kedelai dan ketan hitam di lumbung sehingga isinya berhamburan. Namun, betapa terkejutnya Nyai ketika mendapati kedua anaknya yang dicari

tewas tertimbun kedelai di lumbung. Sejak saat itu, kehidupan Nyai Bagelen dan Raden Awu-awu Langit penuh dengan pertengkaran, sampai kemudian sang suami memutuskan kembali ke daerahnya di Awu-awu, sementara istrinya tetap tinggal di Bagelen. Nyai Begelen menggantikan suaminya memerintah Bagelen. Suatu ketika, Nyai mendengar suaminya meninggal dunia di Awu-awu. Dia merasa sedih dan menunjuk putranya, Raden Bagus Gentha, untuk menggantikan kedudukannya. Lalu dia masuk kamar dan menghilang (*moksa*). Namun sebelumnya dia berpesan kepada anaknya agar semua anak keturunannya dilarang melakukan jual beli atau mengadakan hajatan pada hari Selasa Wage. Orang-orang Bagelen juga dilarang menanam kedelai dan beternak lembu, serta memakai kain lurik, kebaya gadung melati, dan kemben bangau tulis (<http://sejatininghidup.blogspot.com/2014/02/sejarah-bagelen.html>).

Sejarah (juga cerita rakyat, legenda, atau mitos) selalu merefleksikan cara berpikir masyarakat. Menurut perspektif kaum feminis, sejarah tidak pernah netral. Bagaimanapun, sejarah tidak terlepas dari pandangan dunia penulisnya. Dalam masyarakat yang patriarkis, laki-laki selalu digambarkan sebagai sosok yang penting dan berdaya, sementara perempuan dianggap tidak penting dan jarang (di)tampak(kan) perannya. Menurut Pangastoeti (2009), hal ini disebabkan subjektivitas dalam penulisan sejarah yang didominasi laki-laki. Dalam posisi di pinggiran, perempuan dianggap tidak memiliki kontribusi penting dalam perkembangan masyarakat. Hampir semua sejarah ditulis dalam narasi yang sama di mana tokoh penting atau pelaku sejarah selalu laki-laki, padahal menurut Ahimsa (2019), dalam semua peristiwa sejarah selalu melibatkan laki-laki dan perempuan. Hasil kajian Ahimsa dalam peristiwa heroik “Serangan Umum 1 Maret 1949” di Yogyakarta menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai pengelola dapur umum sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan serangan tersebut. Namun sejarah tidak pernah menyebut peran perempuan. Masih menurut Ahimsa, masyarakat sering melihat Jokowi sebagai sosok penting dan sukses, tapi mereka tidak pernah menengok peran ibu yang mendidik dan membesarkannya. Sebaliknya, tak jarang justru perempuan “dikambinghitamkan,” digambarkan sebagai pemimpin yang tidak kompeten atau sebagai penyulut peperangan. Sebagai contoh, di suatu masa Aceh pernah mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan seorang sultanah (baca: perempuan), namun sejarah menulis sebaliknya (Abdullah, 2018). Tokoh Helena, perempuan tercantik di dunia dalam mitologi Yunani, dianggap sebagai penyebab perang besar antara Sparta dan Troya.

Perempuan yang memiliki kesaktian tinggi (baca: kekuasaan) juga dianggap berbahaya karena adanya anggapan (*gender stereotype*) bahwa perempuan pada dasarnya memiliki kendali diri dalam hal emosi dan perilaku yang lebih rendah dibanding laki-laki (Brenner, 1995). Tanpa kendali diri yang kuat, kekuasaan justru sangat berbahaya. *Gender stereotype* ini terlihat dalam cerita rakyat tentang Calon Arang dari Dusun Girah yang hidup di zaman kekuasaan Raja Airlangga. Calon Arang digambarkan sebagai tukang santet yang menakutkan, padahal bukti arkeologis menunjukkan bahwa dia memberontak kepada Raja Airlangga karena ingin mempertahankan wilayahnya, Istana Sekheteng di Kerajaan Rajegwesi (Sukatman&Siswanto, 2016). Mitos tentang Nyai Roro Kidul yang cantik dan sakti juga menggambarkannya sebagai tokoh yang *nggegirisi* (menakutkan) sehingga para nelayan harus melakukan sedekah laut untuk menghindari kemurkaannya. Legenda rakyat tentang Nyai Bagelen sebagaimana diuraikan di atas juga mengambil pola yang sama: ketika perempuan memiliki kuasa bisa fatal akibatnya. Mengapa perempuan yang berdaya dianggap berbahaya? Bagaimana perspektif feminis melihatnya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif (Newman, 1994) dipilih agar dapat mengkonstruksikan realitas sosial dan kultural terkait konstruk budaya di balik legenda Nyai Bagelen yang memosisikan perempuan berdaya sebagai perempuan yang berbahaya. Mengacu kepada pemikiran Suseno (1984), konstruksi teoretik dalam ilmu pengetahuan modern dibangun atas dasar kepastian intuitif guna mencapai kejelasan logis. Konstruksi teoretik dalam penelitian ini berdasarkan berdasarkan naskah-naskah tentang Bagelen serta wawancara dengan berbagai sumber. Metode pemilihan informan menggunakan *snowball sampling* (Harrison, 2007). Informan penelitian meliputi tokoh sejarah dan budaya Bagelen, tokoh perempuan di wilayah Bagelen, dan akademisi pemerhati budaya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian secara simultan hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagelen sebagai Latar Peristiwa

Di mana Bagelen? Buku *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo* (tanpa tahun) menyebutkan, wilayah Bagelen terbentang di antara Sungai Cingcinguling di bagian barat hingga Pegunungan Menoreh di bagian timur; lereng selatan Gunung Sumbing di bagian utara dan Samudera Hindia di bagian selatan. Wilayah ini sekarang dikenal sebagai Kabupaten Purworejo. Menurut sejarawan MT. Arifin (<http://facebumen.com/sejarah-kebumen>, diakses 25 Juli 2018), wilayah Bagelen lebih jelas dipahami sejak Zaman Mataram, terutama saat Sultan Agung Hanyakrakusuma berkuasa (1613-1645). Sultan Agung mengembangkan kosep kewilayahan berdasarkan hubungan politik dan sistem *apanage (lungguh)*. Pada tahun Jawa 1555 (1636 Masehi), Sultan Agung membagi wilayah kerajaan di luar *negari* (pusat kekuasaan) yang bukan *mancanegari* (wilayah luar yang jauh) menjadi empat, salah satunya *Tanah ing Pagelen*, meliputi wilayah sekitar Purworejo-Kebumen. Sementara Laksono (*dalam* Priyadi, 2003) menggunakan teori oposisi biner memosisikan kerajaan sebagai pusat dan Bagelen sebagai pedesaan dalam kerangka struktur masyarakat Jawa. Bagelen di Zaman Mataram di bawah Sultan Agung disebut daerah Sewu, meliputi wilayah antara Sungai Bagawanta di sebelah timur hingga Sungai Donan Cilacap di sebelah barat.

Dalam kerangka struktur masyarakat Jawa, wilayah Bagelen merupakan wilayah pinggiran sehingga dimungkinkan memiliki latar budaya yang berbeda dibanding wilayah pusat kebudayaan Jawa. Budaya bagelen memiliki struktur sosial masyarakat yang lebih terbuka dan lebih egaliter. Meski masih banyak kelas priyayi di wilayah Bagelen, namun tatanan sosial tidak mencerminkan nilai-nilai feodalistik yang kuat (Priyadi, 2004).

Kultur Patriarki dan Kendali atas Perempuan

Hampir semua masyarakat di dunia merupakan masyarakat patriarkis yang memosisikan laki-laki sebagai yang utama. Studi Gallagher menemukan bahwa baik di Barat maupun di Timur perempuan lebih sering digambarkan di ruang domestik dalam hubungannya dengan suami mereka. Mereka dicitrakan sebagai individu yang patuh, pasif, dan peragu (dalam Zoonen, 1995). Namun, apabila ada perempuan yang berdaya selalu digambarkan sebagai perempuan jahat (*demonization of powerful woman*) (Rhode, 1995). Mengapa demikian? Sebab dalam kultur patriarki laki-laki memperoleh banyak keuntungan dan mereka berusaha melindungi hak-hak

istimewa mereka sambil secara bersamaan menolak dan merendahkan pengalaman, nilai-nilai, dan kepentingan perempuan (Wood, 2006). Hal ini juga tampak dalam legenda Nyai Bagelen.

Perempuan Jawa yang sering digambarkan sebagai *kanca wingking* penurut yang tugasnya direduksi hanya *macak*, *manak*, dan *masak*; domainnya sekitar dapur, kasur, dan sumur. Para istri priyayi Jawa bahkan sering dianggap sebagai properti laki-laki, menjadi salah satu simbol status satria Jawa, selain *wisma* (rumah), *turangga* (kuda), *kukila* (burung peliharaan), dan *curiga* (senjata). Mereka digambarkan sebagai perempuan cantik yang suka *ngadi sarira* (merawat diri) dan *ngadi busana* (berbusana indah), karena mereka sekadar diposisikan sebagai “perhiasan” bagi suami. Berbeda dari stereotip perempuan Jawa, Nyai Bagelen digambarkan sebagai perempuan yang rajin dan ulet. Sekalipun merupakan istri penguasa (kelas priyayi), dia tetap suka bekerja keras. Bersama sang suami, dia menanam kedelai hitam dan ketan wulung yang hasilnya melimpah, serta memelihara sapi. Dia juga pandai menenun. Dengan kata lain, Nyai Bagelen merupakan perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi. Sekalipun sibuk bekerja, dia tidak pernah melupakan perannya sebagai seorang ibu. Sambil menenun, dia tetap menyusui anak-anaknya. Artinya, dia merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab.

Ketika menikah, perempuan Jawa cenderung kehilangan identitas diri. Masyarakat memperlakukan perempuan yang sudah menikah sesuai dengan status yang disandang suami. Statusnya terikat dengan status suami, bahkan namanya sendiri hilang digantikan nama suami. Berbeda dari perempuan Jawa pada umumnya, Nyai Bagelen tetap menggunakan namanya sendiri, tidak berubah menjadi Nyai Awu-awu Langit mengikuti nama sang suami. Artinya, ada pengakuan masyarakat atas diri pribadi Nyai Bagelen yang terlepas dari statusnya sebagai istri seseorang. Penyebutan ini sangat mungkin terjadi di lingkungan budaya Jawa pinggiran yang lebih terbuka dan lebih egaliter.

Masyarakat Jawa memiliki pemahaman kekuasaan sebagai “kasekten,” atau dalam bahasa Anderson (1990) *intangible, mysterious, and divine energy that animates the universe* – sebuah energi yang tak terwujud, misterius, dan ilahiah yang menjiwai semesta. Orang-orang yang memiliki *kasekten* ini menduduki status sosial tinggi. Nyai Bagelen dikenal sebagai sosok yang suka *tapa brata* dan dipercaya memiliki kesaktian yang tinggi, bahkan hingga saat ini banyak masyarakat yang *ngalap berkah* ke makamnya.

Kesaktian dan kemandirian ekonomi membuat Nyai Bagelen memiliki posisi tawar di hadapan suami. Ketika dia sedang bingung mencari anak-anaknya yang sampai sore belum pulang dari bermain sementara sang suami saat ditanya memberikan jawaban yang kurang mengesankan, Nyai berani menunjukkan sikap melawan – meski akibatnya fatal. Ketika sang suami memutuskan pulang ke daerah asalnya, dia juga mampu menunjukkan kemampuannya memimpin Bagelen (kemandirian politik). Namun dia tetap dicitrakan sebagai perempuan setia, yang memilih moksa ketika tahu suaminya tiada. Pesan yang tersirat, betapapun hebatnya seorang perempuan, dia tetap membutuhkan laki-laki dalam hidupnya.

Ketika masyarakat menjadi sumber pengetahuan, maka pengetahuan yang direproduksi tidak lepas dari cara berfikir masyarakat (Abdullah, 2018). Dalam masyarakat patriarki yang memosisikan laki-laki sebagai yang utama, semesta pengetahuan dibangun dalam rangka mempertahankan keunggulan dan keuntungan laki-laki. Dalam legenda Nyai Bagelen tersirat pesan bahwa perempuan yang sibuk bekerja di luar rumah (asyik menenun) maka dia tidak dapat mengurus anak dengan baik (anak-anaknya mati di lumbung); mengabaikan pesan bahwa kemakmuran dan kemajuan Bagelen tidak terlepas dari peran ekonomi perempuan. Mengapa? Sebab kemandirian ekonomi perempuan dipandang sebagai ancaman bagi dominasi laki-laki.

Perempuan yang memiliki *kasekten* (baca: kekuasaan) juga dianggap berbahaya, sebab ada asumsi bahwa *men have greater self-control than women over their emotion, behavior, suggesting that men are naturally stronger than women in a spiritual sense*” (Brenner, 1995). Tanpa kontrol diri yang kuat, kesaktian seseorang sangat berbahaya seperti yang dikisahkan dalam legenda Nyai Bagelen. Ketika Nyai tahu yang menyusui bukan anaknya melainkan seekor anak sapi, dia malu dan marah bukan kepalang lalu membunuh si anak sapi, bahkan berpesan agar anak keturunannya tidak boleh memelihara sapi. Ketika sang suami dianggap menyepelekan, Nyai tersinggung dan meluluhlantakkan lumbung sehingga anak-anaknya mati tertimbun kedelai. *Demonization of powerful woman* sejatinya merupakan upaya laki-laki untuk mempertahankan keunggulannya, mencegah perempuan memiliki kekuasaan sehingga tetap dapat didominasi.

Nama Nyai Bagelen hingga kini masih dikenal masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Bukan sebagai tokoh perempuan yang mengajarkan kemandirian ekonomi dan politik, melainkan direduksi sebatas sebagai tokoh sakti yang dianggap bertuah. Tokoh-tokoh perempuan di wilayah Bagelen juga tidak menjadikannya sebagai sumber inspirasi. Mereka menyebut R.A. Kartini dan

Indira Gandhi sebagai tokoh panutan. Wawancara dengan para tokoh budaya Bagelen mendapati fakta menarik, bahwa para perempuan Bagelen sendiri umumnya malu dan risih ketika dikaitkan dengan Nyai Bagelen karena mereka sering mendapat perundungan sebagai perempuan berpayudara panjang, seperti halnya Nyai.

KESIMPULAN

Legenda sebagai salah satu sumber pengetahuan masyarakat tidak terlepas dari cara berfikir masyarakat. Dalam masyarakat yang patriarkis, pengetahuan diarahkan untuk mempertahankan keunggulan laki-laki atas perempuan. Ketokohan Nyai Bagelen yang mengajarkan pentingnya kemandirian politik dan ekonomi serta perlunya menjaga identitas diri direduksi menjadi sekadar tokoh mistis yang memiliki kesaktian tinggi. Pesan tersirat yang ditangkap masyarakat adalah bahwa perempuan yang berdaya berbahaya (tentu saja ya, bagi keberlanjutan patriarki). Perlu ada kajian sejenis agar tokoh-tokoh lokal, khususnya tokoh perempuan, dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi yang telah mendanai penelitian melalui skim Penelitian Berbasis Kompetensi 2018-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Krisnhna Bayu&Sri Wintala Achmad. 2018. *Perempuan-perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*. Bantul: Araska.
- Anderson, Benedict R. 1990. *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia*. New York: Cornell University.
- Brenner, Suzanne. 1998. *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*. Princeton, N.J: Princeton University Press.
- Danandjaja, James. 1984. *Folkfor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metode Penelitian Politik*. Terjemahan Tri Wibowo, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Newman, Lawrence. 1994. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Bacon.

- Pangastoeti, Sri. 2009. "Perempuan yang Terpinggirkan dalam Penulisan Sejarah," dalam Siti Hariti, *Gender and Politics*. Yogyakarta: PSW UGM.
- Priyadi, Sugeng. 2004. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Kebumen*. Yogyakarta: Jendela.
- Rhode, Deborah L. 1995. "Media Images, Feminist Issues." In *Signs: Journal of Women in Culture and Society*. Vol. 20 No.3, University of Chicago.
- Sukatman&Siswanto. 2016. "Alternatif Solusi Konflik dalam Cerita *Calon Arang*." Dalam *Jurnal Atavisme*, Vol. 19, No. 1, Edisi Juni 2016. Diakses 27 Oktober 2019.
- Thompson, P. (2012). *Suara dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan*. Penerjemah W.W Yusuf. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wood, Julia T. 2006. *Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture*. Wadsworth Publishing Company.
- Wawancara dengan Prof. Dr. Irwan Abdullah, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Prof. Dr. Heddy Shri-Ahimsa Putra, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2019.
- _____. Tanpa tahun. *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo*. Pemerintah Dati II Purworejo, Jawa Tengah.
- _____. 2014. *Sejarah Bagelen*. <http://sejatininghidup.blogspot.com/2014/02/sejarah-bagelen.html>, diakses 25 Juli 2018.
- _____. Tanpa tahun. *Sejarah Kebumen*. <http://facebumen.com/sejarah-kebumen>, diakses 25 Juli 2018

Compose

Inbox 7

Starred

Snoozed

Important

Sent

Drafts 1

Categories

sofa +

[Make a call](#)

Article Submission

sofa marwah <sofamarwah75@gmail.com>

Thu, Jan 10, 11:05 PM

to kk.soh ▾

Dear team of Kritika Kultura

Here I submit my article that entitled "Women of Peripheral Javanese Tradition : A Nearly-Abandoned Inspiration".
I hope the article can publish on your journal, Kritika Kultura.

Thanks you so much

regards,

Dr. Sofa Marwah
Department of Political Science
Jenderal Soedirman University
Purwokerto, Central Java, Indonesia
Scopus ID : 57194090423

WOMEN OF PERIPHERAL JAVANESE TRADITION: A NEARLY-ABANDONED INSPIRATION

Sofa Marwah, Soetji Lestari, Tri Rini Widyastuti
Universitas Jenderal Soedirman
sofamarwah75@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify the women contribution in the development of peripheral Javanese community, Bagelen. It is vital due to relatively scarce information about women contribution in this area. So far, knowledge of community development is predominantly occupied by men contribution or noble women. It is a qualitative study supported by theoretical construction derived from relevant historical documents. The results reveal that Bagelen women as peripheral Javanese women instead of central Javanese significantly contribute to preserving tradition, religion, dynasty, cultivate agriculture and production. The contribution of Bagelen women in preserving dolalak dance, upholding religious verses through art and songs, delivering Islamic verses, is barely acknowledged by the public as a women effort in standing up for tradition and upholding their religion due to the prevailing hegemony. Hence, the knowledge should provide space to prove that the women contribution is significant to be the resource for the community so that the community development is persistently inspired by its localities.

Keywords: *Bagelen, contribution, knowledge, peripheral Javanese, tradition, women*

About the Author

Sofa Marwah is a lecturer of Departement Political Science, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia. She was graduated from Doctoral Program of Political Science, Universitas Indonesia. Her research interests are politics, women, and cultural. She wrote books such as *Contestation of Women and Politics in Banyumas Culture*, *Women in Islamic Power Tradition in Banyumas*, and *Indonesia Political Thinking*.

Introduction

This paper aims to identify the women contribution of a peripheral Javanese community, namely Bagelen. Bagelen is a Javanese subculture that is not part of the central Javanese culture. Geographically, Bagelen culture covers the southwestern part of Java. The center of power and culture called *negarigung* (central of power) region encompassed Surakarta (Solo) and Yogyakarta (Koentjaraningrat 25-27). The Bagelen region has become a peripheral area since the Giyanti Agreement on February 13, 1755, which was fully loaded by Dutch colonial interference. This agreement forced the Mataram Kingdom under Sunan Pakubuwana to be divided into Surakarta (Solo) Sunanate and Yogyakarta Sultanate. The agreement confirmed the power of Sultan Hamengkubuwana in the Sultanate of Yogyakarta who reigned half of Central Java (Ricklefs 149). The Bagelen region was also affected by the agreement. Prior to the Giyanti Agreement, the region belonged to *negarigung*, but it shifted to become *mancanegara* (beyond) region as the power change occurred. As a part of *mancanegara* region, Bagelen always referred to as how power is implemented from *negarigung*.

This research is vital since women frequently become forgotten figures in community development. This study fills out the previous ones that examined the contribution of women in the development of community groups, namely Nastiti (2016) on the position and role of ancient

Javanese women of the VIII-XV century; Carey and Houben (2016) on the powerful women in Java in the XVIII-XIX century; Permanadeli (2015) who studied the social representation of Javanese women in the modern era; Adji and Wintala (2018) about women who ruled Java. Then, Pangastoeti (2009) addressed marginalized women in human history due to subjectivity in male-dominated historical writing while women in marginal positions are not deemed to provide a pivotal role in the development of society.

The history of community development is indeed subject to the ruling authority. A king will assign his letterman to write according to the king's wishes. Generally, the news of a Javanese ruler talks about how the greatness of the king, the prosperity of the people as the evidence of king's success, the conquest of a region, and so on. The development of society and power has an orientation to the center of power while the power is held by the king who is dominated by men. Consequently, a lot of knowledge is profoundly produced by men. In contrast, the existence of women became invisible in a community growth as the king's rule prevailed.

The study of the women present in the development of society is largely found in women at the top positions: women as queens, royal women, or upper-class women, according to Abdullah said (2018). This confirms the men dominance who are present as kings or princes, to whom the journey of human history and public knowledge is attached and continues to be produced from time to time. Hence, the study of the women contribution of the Bagelen community as a representation of peripheral Javanese culture is expected to provide a crucial contribution to show that women either upper-class women or peripheral ones provide extensive contributions to the social development. To achieve this goal, the study was divided into several sections: the first part shows the significance of research on the contribution of women in the traditions of peripheral societies; the second part presents the research method used, namely qualitative research supported by theoretical construction based on Bagelen historical sources; the third part discusses Bagelen women as guardians of traditions and cultures that are not widely known and understood by the public; the fourth part examines women as upholders of religion and belief; and the last section presents the conclusions of this study.

Research Methods

This is a qualitative study (Newman 4) to construct social reality and cultural meanings related to the women contribution of the Bagelen community in Purworejo and Kebumen Districts. This study also uses theoretical constructs based on related literature, such as chronicles, legends, and other historical and cultural documents. Referring to Suseno (4), theoretical constructs in modern science are built on the basis of intuitive certainty to achieve logical clarity. Research informants were selected by snowball sampling (Harrison 25), starting from one particular informant and continuing to the next informant according to the development of information elicited in the field. Research informants involved the historians and cultural figures of Bagelen from Purworejo and Kebumen; female leaders in Bagelen area; arts and culture enthusiasts; and academics observing history, culture, and religion. Data were collected using a combination of in-depth interviews, document studies, and observations. Data processing began with the data classification process, and then theoretical abstraction steps on information obtained to formulate basic statements. The analysis is carried out simultaneously throughout the research process to reach fundamental conclusions as research answers.

Bagelen Women as a Tradition Guardian

Bagelen lies between two cultures, Javanese culture in the east and Banyumas in the west. Therefore, Bagelen shows a transitional culture. This can be seen from its vernacular language. Bagelen dialect is a mixture of Javanese and Banyumas languages. The influence of the Javanese language can be seen in some people who apply Javanese speech level (*ngoko*/low, *madya*/middle, *krama inggil*/high) while the Banyumas language obviously dominates the daily speech which has no speech level regardless the social strata. One word to prove the influence is the word "*enyong*." The word can be compared with the word "*inyong*" in the Banyumas language which means "I." In Banyumas culture, the word "*inyong*" has become a language symbol that reflects a culture of "*penginyongan*" which illustrates the more egalitarian society, not based on strong social layers. "*Penginyongan*," which comes from the word "*inyong*" to refer to the first person singular, shows a form of social relations that is informal, egalitarian, unpretentious, and humorous. Of course not all places in the Bagelen area use this dialect since some people also use Javanese.

Ludi's study (2014) shows that Purworejo region is influenced by standard Javanese (Yogyakarta) and Kebumen dialect. In this case, Kebumen dialect reflects the strong influence of the Banyumas language. Similarly, the study of Priyadi (1-2) states that several Kebumen cultures represent a mixture of Banyumas *penginyongan* culture and Yogyakarta culture or known as *priyayi*/upper-class culture. Priyadi (191) also emphasizes that as a Javanese culture, Bagelen culture has a more open and loose social structure, unlike central Javanese culture. Despite much upper-class (*priyayi*) in the Bagelen region, the social order that is formed does not reflect strong feudalistic values.

The origin of the Bagelen community is an agricultural society largely relying on livelihoods from the Bogowonto River valley. As a farming society, the dominant community structure is mutual cooperation and prioritizes common interests. In its development, farmers are still one of the main livelihoods of the community, especially in the lowlands such as the Bogowonto River valley. Meanwhile, the Bagelen regions in the coastal area, either Purworejo or Kebumen Regencies, the local people make a living as fishermen. Some hilly areas of Bagelen are commonly used by local residents for plantations including the wide variety of fruits. In both Purworejo and Kebumen Districts; the community has local handicrafts, namely *batik*. The local batik production named Adipurwo in Purworejo Regency and Gemeksakti *batik* in Kebumen Regency. The variety of *batik* patterns produced by the two districts can be widely used by people. In terms of coloring, the Bagelen society is free to create bright colors which actually reflect more egalitarian values they hold. In contrast, in the central Javanese tradition, the *batik* patterns characterize which class the wearer of *batik* is. Thus, the traditional Adipurwo *batik* in Purworejo Regency and Gemeksakti *batik* in Kebumen Regency characterizes egalitarian values because they can be worn by all groups of people.

To see the contribution of women in the early development of the Bagelen community, it starts with a discussion of the origin of Bagelen. There are abundant versions that explain the origin of Bagelen people. However, this paper uses official sources of the Purworejo Regency Government. According to *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo* (without years), the origin of the Bagelen people cannot be separated from *prasasti* (inscriptions) later known as Prasasti Kayu Ara Hiwang or Prasasti Boro Tengah (823 AD). The events as sculpted in the *prasasti* were in the period of Hindu-Buddhist civilization in the era of Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung during the Hindu Mataram rule in Java.

In the inscription, there is no information about women. The figure in the inscription is Dyah Sala Putra Sang Raja Bajra, a senior officer of the Hindu Mataram Kingdom. This inscription described the people of the Bogowonto River valley living in prosperity, order, good religious life, orderly and authoritative government, and community cooperation. There is no information that explains whether women have an important contribution in maintaining community prosperity and order at that time. The absence of information about women shows that those who produce knowledge are male-dominated rulers who do not involve the women contribution. In this case, we can assume that in fact prosperity and order cannot be separated from the dimensions of feminine traits attached to the women capability to contribute significantly in fulfilling family needs and creating order and peace in the community.

In the history of Bagelen, the female figure attached to the Bagelen community was Nyai Ageng Bagelen. The name Nyai Bagelen in Santoso (2013) also referred to Roro Rengganis. Unfortunately, the source of historiography about Nyai Bagelen is not provided in an inscription or chronicle but in form of folklore passed down over the generation. Nyai Bagelen is the ancestor of the Bagelen community who is described as a resilient farmer. She also raises and weaves while taking care of household chores. Nyai Bagelen is also depicted as a woman who has a strong stance, even daring to "fight" her husband to defend her opinion. Nyai Bagelen also has a leadership spirit. When her husband, Raden Ngawu-awu Langit, decided to go back to his origin due to a dispute with her, Nyai Bagelen replaced her husband's position as a leader in the Bagelen region. Nevertheless, Nyai Bagelen chose "*moksa*" (the body disappears) when her husband died, as a form of loyalty to her husband.

In terms of names, the address "Nyai Bagelen" with its own name also shows cultural recognition of the important position of women. In this case, the woman recognized her identity with her own name, without relying on the husband's name. It is very likely that it was influenced by the peripheral Javanese culture which is more egalitarian and free than the central Javanese culture (Yogyakarta-Solo). That is, the identity of the female character itself is actually recognized and respected in the past. This identity is constructed in the context of men and women through one's name. Identity as men will be signified as a men group, and become a marker of difference from the "confronted" group namely women (Woodward 2). Clearly, the identity of Nyai Bagelen as herself was recognized by the community and her descendants, not hidden.

As time goes by, the figure of Nyai Bagelen, however, was reduced to the issue of gender bias. When the community becomes a source of knowledge (Abdullah 2018), the knowledge that is perpetually reproduced will also confront ideologies that prioritize men over women which cause the greatness of female characters to fade away due to its gender bias. In this case, Mulder's study (1996) can help clarify the situation of gender bias. Mulder points out that Javanese people have a well-maintained share of symbolic roles in terms that men in the family have role in public affairs while woman plays her role in domestic affairs, as shown in Javanese expressions: *wong lanang nang ngarep*, *wong wedok nang mburi* (men are in the front, women are behind, lit.). The basic principle of this division is complimentary. In the context of equality discourse, it does not refer to the same position as men. Despite its complementary, as society develops, the women contribution is increasingly invisible and unknown to the public for persistently being "placed behind," to complement the "front party". As a result, the involvement of women increasingly worn out and unknown to the wider audience.

In the context of Nyai Bagelen figure which experienced a history gap in terms of knowledge by the public, Abdullah (2018) stated that the figure of Nyai Bagelen experienced

what so-called appropriate where a female leadership became invisible to the public that prevents the knowledge of Nyai Bagelen as a local female figure from the spotlight. The existence of Nyai Bagelen figure is more symbolized by mythical matters which obscure its real virtues. The capability of Nyai Bagelen as a local leader who manages agricultural fields, raise livestock, and the weave is not widely exposed. Likewise, the traits of Nyai Bagelen as a determined, firm and assertive woman are somehow abandoned by people.

Till present, the name Nyai Bagelen is still well-recognized in the Bagelen community, especially in Purworejo Regency. However, the public memory of Nyai Bagelen is only limited to past figure who is closely related to magic and mystical. In fact, the figure of Nyai Bagelen should also be presented as a figure capable of taking care of agriculture, animal husbandry, and weaving, which can inspire Bagelen community. The competence of Nyai Bagelen as a political, agricultural and industrial leader remains unexplored.

The figure of women in Bagelen can also be seen from *dolalak* dance that lived and developed in this region until now, particularly in Purworejo Regency. The history of the Dolalak dance is related to the Dutch colonial period when the Dutch built military forces in the Purworejo area for the center of defense. The indigenous soldiers who were required to join the military by the Dutch spent their spare time by dancing, singing and dancing that gradually, *dolalak* dance developed. Yet the existence of *dolalak* dance is then closely related to the habits of the local community, especially in relation to folklore or local legend (Santoso 239-240).

Dolalak dance was originally carried out by male dancers then it developed that was dominated by women. The shift from male *dolalak* dancers to female dancers made the existence of these traditional arts increasingly developed in the community. The study conducted by Santoso (2013) shows that women play a central role in promoting traditional arts. Women are behind the success of a performing art either traditional or modern. Nowadays, it tends to be a shift in the role of women limited to only on the performance stage.

In reality, there are not sufficient sources discussing the origin of *dolalak* dance along with its cultural system. The dance is believed to have formed around 1915 when Dutch colonialism was still firmly entrenched on this country. In this context, Carey (xii) explains that the Dutch archives generally reflect the reality of male-dominated colonialism. Carey emphasized that at that time Javanese elite women were entangled in a narrow space. Needless to say that the arts were born among ordinary people and the initiation was still dominated by men. However, when *dolalak* is played by women, it is obvious that women are capable to be the guardian of culture and tradition.

The description affirms that in terms of arts and tradition, women contributions cannot be underestimated. The study conducted by Santoso above is part of an effort to show that women actually also fill the public knowledge space (Abdullah 2018). Since the historical reality during colonialism (in this case the Dutch colonial occupation) shows male dominance, the contribution of women is not apparent, especially for women in the peripheral regions. At that time, elite Javanese women were confined to a narrow circle of power, as shown by Carey's study above.

Thus the study of the women contribution in the journey of a community group is also an effort to place women as a center for comprehending cultures as a whole. Such conditions occur because the fields of science are androcentrism, a construction dominated by male interest and power either through political or economic order which causes directly or indirectly subordination to women (Budianti 207). This makes the presence of women in the history of a community group often out of sight.

The effort to examine the women position in a peripheral culture is part of demonstrating the importance and necessity of knowledge based on women ways of knowing or ways of producing knowledge based on the principle of femininity (Shiva 1997). Shiva is putting women who at first as the main object of change, as the center of the process of change and knowledge creation. Science will be well-implemented if it is accepted and integrated with the given cultural systems. If science, in contrast, does not produce something important and meaningful for a community group, then it has not been successfully cultured (Kleden 1987).

Bagelen Women as Religious Upholders

This section explores the contribution of peripheral women in religious affairs. Permanadeli's study (250) shows that women in Javanese mythology are symbols of living things that protect the lives. Javanese women are represented as those who always move to fight for the living. Javanese women hold their power to balance real-world life. In this regard, the story that contains the cosmological order infertility myths is known throughout Java. The fertility symbol in Javanese belief is in the figure of Dewi Sri as the goddess of rice. The story related to Dewi Sri contains teachings about rice cultivation and fertile life. Pamberton (280) shows that the story of Dewi Sri exists throughout Java, along with the various versions of the figure and relatively different forms of worship. Even the story of Dewi Sri as a symbol of fertility among farming communities is also recognized in Pasundan Land.

The Bagelen community is basically a religious agricultural society. This can be observed from an agrarian environment situation and later developed into an animistic society. The religious characteristics can be discovered from animistic beliefs, then people adhered Hinduism and Buddhism, and later Islam. When the Hindu-Buddhist development period, they glorified Lord Shiva (Hinduism) and mixed it with Javanese culture. Some local people also embrace Buddhism. The Bagelen community is also best known as a religious society that lives side by side between people of different religions. In this case, religious leaders have a special position in the lives of local people.

In regard to the Islam development in the Bagelen region, there are three main sites that display the early development of Islam in the past, namely Petilasan Sunan Geseng, Sunan Geseng Mosque, and Santren Mosque (*Office of Tourism and Culture Purworejo* 2008). Petilasan Sunan Geseng is on a hill located in Bagelen Village, Bagelen District. The name Sunan Geseng is also used for the Sunan Geseng Mosque. Sunan Geseng Mosque was built in the 19th century during the reign of Tumenggung Cokronegoro. The mosque has overlapping roofs, one and above there are *mustaka* (the head) made of clay. It consists of the main room and *limasan* (pyramid) roofed porch.

Another site that signifies the Islam development in this region is the Santren Bagelen Mosque. The historical background related to the mosque is the King of Mataram, namely Sultan Agung who ruled the Mataram Kingdom at its peak, namely 1613-1645 AD. The mosque also became the oldest mosque in the Bagelen region. Bagelen Mosque was established based on the instruction of Sultan Agung's wife. The order was intended to reward the services of Kyai Baidlowi. The connection of Bagelen Mosque with Sultan Agung was reinforced by the number of 1618 in one of the tombs which indicates the reign of Sultan Agung.

The explanation above shows that the presence of women in the early development of Islam in the Bagelen region was not apparent. There is unclear general knowledge that women also contribute to spreading Islam in the Bagelen region. The sites of the greatness of Islam in Purworejo Regency for example, always refer to the men contribution who develop Islam in the

region. We never knew how women were present in the early days of the development of Islam in the region. The leaders of the spread of Islam in another part of Bagelen areas including Kebumen Regency also refer to the figure of men such as Sheikh Asnawi, Anom Sidakarsa, and Abdul Awal, who spread Islam in the southern coastal region of Java. Are women thus absent in coloring the development of Islam at that time? It seems impossible that the spread of Islam did not involve women. One proof is the order of Sultan Agung's wife to build the Santren Bagelen Mosque as a reward for the support of Kyai Baidlowi towards Mataram. Information about the involvement of women in the early days of the development of Islam in Bagelen was indeed scarce, yet it did not mean that the contribution did not exist. Further investigation is needed to show the public about the contribution.

Like other regions in Java, the introduction and development of Islam in Bagelen region were also confronted by the strong local traditions close to pre-Islamic beliefs. The tolerance that is built towards these conditions is not in the form of art as entertainment, nor as a form of worship. Walisongo's role in spreading Islam in Java through *wayang kulit* (leather puppet) or *wayang golek* (wooden puppet) was an attempt to make Islam easily accepted at that time. Graaf's study (in Raap xx) shows that this was a secularization of art because the local art developed into show material rather than a strong local religious ritual. The development of Islam in the Bagelen region is more prominent in the southern coastal region of Java. Islamic tolerance for traditional practices before Islam entered Bagelen region was manifested by the embodiment of religious symbols in *wayang kulit*; *dolalak* art in Purworejo accompanied by traditional songs and *sholawatan* (pray for the Prophet Muhammad); *jamjaneng* and *rebana* art in Kebumen that combine traditional and Islamic art. In this context, the women involvement in religious services in the traditional arts of the Bagelen community is hardly exposed publicly. Narratives telling the women involved as important as men in reciting sholawat, singing Islamic verses through *jamjaneng* and *rebana* art are hardly known and placed by the public as a form of women involvement in broadcasting Islam.

Apart from Islam, another quite rapidly developed religion in Bagelen region is Christianity, especially in Purworejo Regency. The development of Christianity in Purworejo began to occur before the three decades of the 20th century, which made Purworejo the center of zending Dutch Protestant churches. A former *santri* (local term for Muslim) later known as Kyai Sadrach, became the pioneer of the early history of Christian development in the region. The term "santri" can be harmonized with the mapping of Javanese people in the phenomenal study of Geertz (2017) conducted in 1955 by making the scheme of Javanese cultural maps into three classes: *santri*, *abangan* (peasants), and *priyayi*. Kyai Sadrach was a *santri* who later converted to Christianity even taking a position as a missionary. In 1869 Kyai Sadrach disseminated Christianity in Purworejo along with female Christian leaders, namely Mrs. Philips and Mrs. Oostrom Philips (Carey 221). In addition, to support the spread of Christianity in the area, junior high school level was established by PSSK (Association of Christian Schools). Again, the contribution of women maintains and uphold their religion is not well known by the next generation. Community knowledge about the spread of Christianity in the Bagelen region always refers to the male figure, namely Kyai Sadrach. The public does not place women who also contributed to carrying out their religious duties. One study providing evidence related to this is the participation of women in higher education established by Catholics in Magelang, an area not far from Purworejo. The women involved in higher education also shows the concern or mission of the Catholic religion to provide education for women who are the same as men (Raap 46). It proves that religion actually has a big contribution to the advancement of women education, and

women also become part of the community who contribute to upholding religion in accordance with their respective beliefs

Conclusion

In the course of the history of particular community groups, women are frequently in a marginal position, as if they were not present in the development of society. Seemingly most people agree. Identifying women position in peripheral societies is part of a scientific effort to show that in the course of a society's history, women also contribute and inspire people's journey in the past and should also inspire the next generation. Nyai Bagelen is a guardian of the Javanese tradition and religion, maintaining dynasties, managing agriculture, and production. This finding is actually more profound than Carey's findings that the key role of women in Javanese history is the validator or preserver of the dynasty. If women contribution is only understood so superficially, it is difficult to develop public knowledge (borrowing the term's Abdullah) that women have an important history in the human journey. In this context, scientists need to develop a scientific attitude towards the order of customs and other cultural heritage. When the figure of Nyai Bagelen experienced history discontinuation, the scientific study of the women character in the past is expected to encourage gender and cultural studies especially regarding the character of local women. Moreover, Carey's study shows that since the Diponegoro War or the Java War is over (1825-1830 AD), Javanese culture, as tamed by the colonials, has more been like a museum culture so that those who live today do not know the greatness and character of local women in the past.

The writing of a multidimensional society journey particularly focusing the knowledge on female leaders is, of course, expected to produce a deeper narrative about society. Writing the society journey would be incomplete if it only tells the story of a great person or leader rather than from the side of the people including female figures in the peripheral areas. Culture must have its own mechanism to face the modernity current. That is, deepening thought based on culture is needed to avoid using only external parameters to measure change. Definitely, modernity must consider the cultural dimension as the social identity of every society. Hence, the study of the women contribution in the journey of peripheral communities is part of the issue so that the locality is always a source of enforcing inspiration.

Note

- * Special gratitude is expressed to Penelitian Berbasis Kompetensi (Competency-based Research) 2018, funded by the Ministry of Research Technology and Higher Education.

Works Cited

- Adji, Khrisna Bayu. *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa (Rulers of Java Great Women)*. Araska, 2013.
- Budianta, Melani. "Pendekatan Feminis terhadap Wacana" ("Feminist Approach to Discourse"), in Aminuddin (ed.), *Analisis Wacana dari Linguistik Sampai Dekonstruksi (Discourse Analysis from Linguistics to Deconstruction)*, Kanak, 2002.
- Carey, Peter, Hoube, Vincent. *Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX (Mighty Women in Java Ages XVIII-XIX)*, Gramedia, 2016.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa (The Religion of Java)*, Komunitas Bambu, 2017.

- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik (Political Research Methodology)*, Kencana Prenada Media, 2007.
- Santosa, Jarot Heru. "Seni Dholalak Purworejo Jawa Tengah: Peran Perempuan dan Pengaruh Islam dalam Seni Pertunjukan" ("Dholalak Arts Purworejo Central Java: The Role of Women and Islamic Influence in The Performing Arts"), *Jurnal Kawistara* Vol 3 No.3. 2013. pp. 227-241.
- Raap, Oliver Jaap. *Soeka Doeka Djawa Tempo Doeloe, (Javanese Love-Grief in The Past)*, Gramedia, 2015.
- Kleden, Ignas. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (Scientific Attitude and Cultural Criticism)*. LP3ES, 1987.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa (Javanese Culture)*. PN Balai Pustaka, 1984.
- Ludi, Hanifan. *Bahasa Jawa di Kabupaten Purworejo (Kajian Geografi Dialek)(Javanese in Purworejo Regency (Dialectic Geography Study))*. Thesis of Indonesian Language Study Program, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Mulder, Niels. *Inside Indonesia Society Cultural Change in Java*. The Pepin Press, 1996.
- Nastiti, Titi Surti. *Perempuan Jawa: Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat Abad VIII-XV (Javanese Women: Their Position and Role in The Community Ages VIII-XV)*. Pustaka Jaya, 2016.
- Newman, Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approachs*. Allyn and Bacon, 1994
- Pangastoeti, Sri. "Perempuan yang Terpinggirkan dalam Penulisan Sejarah" ("Women Who are Marginalized in Writing History"), in Siti Hariti, *Gender and Politics*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1999.
- Permadeli, Risa Dadi Wong Wadon, *Representasi Sosial Perempuan di Era Modern (Becoming a Woman, Women's Social Representation in The Modern Era)*. Ifada, 2015.
- Priyadi, Sugeng. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Kebumen (History and Culture of The Kebumen Community)*. Jendela, 2004.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern (The History of Indonesia Modern)*. Gadjah Mada University Press, 1984.
- "Sejarah Purworejo" ("The History of Purworejo"), in [http: www.purworejokab.go.id](http://www.purworejokab.go.id) accessed on 18 July 2018.
- Setiadi, Idham Bachtiar. "Warisan Budaya, Sikap Ilmiah, dan Kritik Kebudayaan" ("Cultural Heritage, Scientific Attitudes, and Cultural Criticism"), in *Mengelola Cagar Budaya, Merawat Peradaban (Managing Cultural Heritage, Caring for Civilization)*. Prisma Vol. 36. No.2, 2017.
- Shiva, Vandana. *Bebas dari Pembangunan (Free from Development)*. Yayasan Obor, 1997.
- Interview with Irwan Abdullah, Professor of Faculty of Humanities, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, on 4 Oktober 2018.
- Woodward, Katryn. *Identity and Difference: Culture, Media, and Identities*. Publication, 1997

Sertifikat



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Diberikan Kepada

Dr. Sofa Marwah, M.Si

Atas Partisipasinya sebagai :

NARASUMBER

SEMINAR NASIONAL "HISTORIOGRAFI BARU DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM INDONESIA"
PRODI SEJARAH PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PADA HARI RABU, 24 OKTOBER 2018 DI GEDUNG SAC UIN SUNAN AMPEL

Surabaya, 24 Oktober 2018
An. Dekan

Ketua Jurusan SPI



Muhammad Khodafi, M.Si.
NIP. 197211292000031001

PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM NARASI SEJARAH ISLAM, POLITIK, DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA

*Sofa Marwah*¹

Dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman
Ketua Puslit Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat, LPPM, Universitas Jenderal Soedirman.

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peminggiran sejarah perempuan dalam narasi sejarah Islam yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan faktor kekuasaan dan kebudayaan. Identifikasi tersebut penting untuk mendukung lahirnya historiografi baru yang lebih berpihak pada kaum marjinal, khususnya kaum perempuan. Identifikasi tersebut juga merupakan upaya untuk menunjukkan kedudukan dan kontribusi perempuan yang sesungguhnya sama penting dengan laki dalam menandai perjalanan sejarah agama, politik dan berlangsungnya tatanan kebudayaan sebuah masyarakat.

Seringkali dalam perkembangan sebuah masyarakat dan bangsa, terdapat anggapan perempuan tidak hadir dan memberi kontribusi dalam kelahiran dan perkembangan suatu masyarakat. Studi mengenai penguatan narasi sejarah Islam dan kebudayaan di Indonesia yang mengangkat kontribusi perempuan sangat penting dilakukan selaras dengan studi Vreede-De Stuers (2008 :13) yang menyatakan pentingnya mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat akibat mengadopsi nilai Islam serta sintesis-sintesis yang terbentuk antara adat dan Islam maupun permasalahan yang terjadi antara keduanya, dalam hal ini terkait dengan kedudukan perempuan di masyarakat.

Marjinalisasi Narasi Perempuan di Wilayah Pusat Kekuasaan Islam

Dari banyak narasi sejarah yang menulis tentang proses Islamisasi di tanah Jawa oleh Walisanga, keberadaan tokoh perempuan dalam Islamisasi lebih banyak ditulis hanya sebagai putri kerajaan atau putri ulama yang menikah dengan tokoh besar dan melahirkan tokoh besar, dalam penyebaran Islam (Marwah, 2016: 27). Konstruksi sosial budaya demikian itu sudah dilekatkan menjadi esensi sejarah yang berlangsung terus-menerus bagi masyarakat dari generasi ke generasi sejak masa lampau. Pertanyaannya, benarkan perempuan hanya hadir sebagai figur yang menikah dan menurunkan tokoh-tokoh penting masa perkembangan Islam? Kalaupun perempuan hadir dalam bentuk kontribusi demikian, apakah berarti kontribusi tersebut tidak penting?

Pada masa kekuasaan Demak, sejak Raden Patah bertahta hingga berakhirnya kejayaan Demak, yaitu masa Sunan Prawata, tidak terdapat satu pun perempuan yang menjadi pemimpin. Ketika Kerajaan Pajang berdiri sampai berakhirnya kekuasaan Pajang dan bergesernya tahta menjadi kekuasaan Mataram, juga tidak ada pemimpin perempuan. Yaitu mulai dari kekuasaan

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional “Historiografi Baru dalam Sejarah Peradaban Islam Indonesia” Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 24 Oktober 2018

Sultan Hadiwijaya sampai Sultan Benawa. Bahkan ketika Kerajaan Mataram (Mataram Islam) berdiri sejak masa kekuasaan Sutawijaya yang berkuasa tahun 1587 M, hingga pembagian Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Solo dan Kasultanan Yogyakarta hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755 M. Pada era politik modern sekarang ini, tidak ada satu pun pemimpin/sultan perempuan. Bahkan sekarang ini Kasultanan Yogyakarta masih mengalami dilema terkait penerus Sultan Hamengkubuwono X.

Kalau memang demikian, bagaimana tafsir yang kita berikan terhadap kedudukan kaum perempuan masa berkuasanya Islam di tanah Jawa? Apakah betul sejarah terkait dengan hal tersebut cukup dilihat dari siapakah yang menjadi pucuk kekuasaan, sehingga terlihat seolah perempuan tidak hadir terlibat dalam membentuk sejarah?

Padahal pada masa kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak, terdapat figur perempuan yang luar biasa namun sumber sejarah mengenai sepak terjangnya sangat minim. Adalah penguasa Jepara, Ratu Kalinyamat yang ikut berkontribusi besar berdirinya Kerajaan Pajang. Terjadinya perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak setelah pemerintahan Sultan Trenggana, menyeret nama Ratu Kalinyamat yang menuntut balas atas kematian suami dan saudaranya yang dibunuh oleh Arya Penangsang. Pada akhirnya Arya Penangsang berhasil disingkirkan oleh Jaka Tingkir yang bersekutu dengan Ratu Kalinyamat dan menandai berdirinya Kerajaan Pajang (Wintala, 2016: 171). Ratu Kalinyamat juga dikenal sebagai pemimpin yang menghalau kedatangan Portugis 1551 dan 1574 di Malaka dan berupaya membangun sekutu yang terdiri dari raja-raja di Malaka untuk mengusir Portugis (Akhyat & Bahaudin, 2016). Berdasarkan sejarah yang ditulis Portugis, serangan Ratu Kalinyamat di Malaka dapat dipelajari melalui catatan Diego de Couto, yang disebut oleh mereka sebagai *Rainha De Jepara Senora De Rica* yang berarti ratu yang sangat kaya dan berkuasa. Dalam novel Pramoedya Ananta Noer (1995) yang berjudul *Arus Balik* juga menyinggung soal serangan Ratu Kalinyamat tersebut.

Selain itu, adalah Ann Kumar (2008) yang melakukan studi terhadap catatan harian anggota korps *prajurit estri* pada masa kerajaan Mataram Islam yaitu masa Raja Mangkunegara I. Kumar menjelaskan bahwa keberadaan korps masa Mangkunegara I tersebut hanya meneruskan tatanan lama. Utusan orang-orang Belanda yang mengunjungi istana pada masa Sultan Agung misalnya, juga dikawal oleh para prajurit perempuan. Korps *prajurit estri* diisi oleh seratus lima puluh perempuan sebagai pengawal raja dengan perlengkapan senjata panah, tombak, tulup atau semprit, dan perkakas yang dibutuhkan raja. Korps *prajurit estri* juga memiliki kemampuan menari, menyanyi, dan memainkan alat musik. Korps *prajurit estri* di tanah Jawa merupakan korps yang paling terlatih dan diistimewakan dalam hierarki perempuan di istana.

Studi dari Carey & Houben (2016) juga menyebutkan keberadaan prajurit estri di Kasunanan Solo, berbaris di bawah tahta Sunan Pakubuwono V dengan bersenjata lengkap, seperti sebilah keris, pedang atau bedil ketika Sunan menerima tamu. Prajurit estri juga menjadi pasukan pengawal raja ketika raja *miyos* atau keluar keraton menemui rakyat atau para bupati. Mereka juga memiliki keterampilan berkuda dan memainkan senjata api. Korps prajurit estri menggunakan seragam resmi bangsawan; sama dengan laki-laki, yaitu *prajuritan*. Kelak ketika

Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa (1825-1830) terjadi, keberadaan *prajurit estri* ini menjadi salah satu pasukan pendukung Pangeran Diponegoro yang penting.

Studi yang Carey dan Houben (2016) mengenai *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX* telah memperlihatkan secara cukup lengkap kedudukan dan keterlibatan perempuan pada abad tersebut dari berbagai sisi. Dari studi tersebut Carey memperlihatkan bahwa perempuan Jawa pada masa itu memiliki peran kuat sebagai penjaga tradisi Jawa, pemelihara wangsa, pembimbing anak, penjunjung agama, dan pujangga. Dalam konteks tulisan ini, keberadaan perempuan sebagai penjaga agama tentu menjadi deskripsi yang menarik. Perempuan sesungguhnya juga hadir memberi warna dan dedikasi bagi keyakinan agama yang dipercayainya. Carey menunjukkan seorang perempuan sufi yang menjadi pengikut tarikat Satariyyah dikenal sebagai pengajar agama Islam sekaligus praktik spritual Jawa, adalah yaitu Ratu Ageng, permaisuri Sultan Hamengku Buwono I. Ratu Ageng adalah komandan pertama korps *prajurit estri* pada masa awal Kasultanan Yogyakarta. Ratu Ageng juga dikenal sebagai nenek buyut Pangeran Diponegoro yang mengasuh dan mengajarkan Diponegoro tentang ajaran Islam dan spiritualisme Jawa.

Selain itu, seorang *prajurit estri* yang sangat dikenal perjuangan dan *laku tapa*-nya adalah Nyai Ageng Serang (1762-1855). Nyai Ageng Serang adalah keturunan Sunan Kalijaga yang sebelum menikah dengan Pangeran Serang, ia menikah dengan Sultan Hamengku Buwono II. Nyai Ageng Serang dikenal memiliki *kesakten* dan sangat dihormati para pengikut Pangeran Diponegoro karena kegigihannya melawan Belanda. Nyai Ageng Serang adalah seorang perempuan pejuang dan pertapa yang mempraktikkan penggunaan jimat dengan ayat-ayat suci Al Qur'an atau *raja* yang diberikan kepada para pengikutnya. Lama setelah Perang Jawa berakhir, ia dikenal tetap memiliki pengaruh penting di daerah Serang-Demak dan sekitarnya.

Hal lain yang menakjubkan adalah pada masa Kerajaan Aceh pada Abad ke-17 juga memiliki tiga ribu prajurit perempuan yang bertugas mengawal istana. Mereka bersenjata tombak panjang, tulup, pedang, perisai, dan busur panah. Kita dapat mempelajari studi dari Sher Banu (2017) yang menjelaskan bahwa masa kejayaan Kerajaan Aceh sesungguhnya dicapai pada saat dipimpin perempuan, yaitu Sultanah Safiatuddin yang memerintah Aceh pada 1641-1675. Kekuasaan Sultanah Safiatuddin dilegitimasi oleh Islam dan adat istiadat setempat. Negara-negara tetangga Kerajaan Aceh menyebutkan Aceh lebih ramai, damai, dan berwajah feminim ketika Sultanah Safiatuddin berkuasa. Sultanah juga berjanji memberi kemuliaan bagi siapapun yang mengunjungi Aceh ketika itu. Sher Banu telah menunjukkan bukti adanya kesuksesan seorang perempuan sebagai ratu di kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sejak itu, berturut-turut yang memimpin Aceh adalah seorang perempuan, yaitu Sultanah Naqiatuddin (1675-1678), Sultanah Zaqiatuddin (1678-1688), Sultanah Zainuddin Kamalat (1688-1699).

Menyitir apa yang disampaikan oleh Irwan Abdullah (2018) bahwa apa yang dilakukan oleh banyak perempuan tidak menjadi fungsi legitimasi. Keberadaan perempuan dalam menorehkan sejarah besar sering dianggap tidak legitimet. Padahal fungsi sejarah adalah melegitimasi, sehingga kontribusi perempuan seharusnya juga dapat menjadi sumber legitimasi dan sumber pengetahuan publik. Lebih lanjut Abdullah menjelaskan tidak ada kesinambungan

sejarah pada masa lalu yang berlanjut pada kehidupan masyarakat sekarang, bahkan menurutnya banyak narasi sejarah kita yang dihilangkan. Perkembangan masyarakat dan kekuasaan memiliki orientasi pada pusat kekuasaan, sementara kekuasaan dipegang oleh raja yang didominasi oleh laki-laki. Tentu saja, karena pihak yang berkuasa didominasi oleh laki-laki, maka laki-laki yang kemudian banyak memproduksi pengetahuan. Dampaknya, keberadaan perempuan menjadi tidak tampak dalam perjalanan sebuah kelompok masyarakat seiring berlangsungnya kekuasaan raja.

Kiranya perempuan memiliki dedikasi besar pada sejarah masa lalu yang seharusnya dapat menjadi inspirasi yang menakjubkan pada masa sekarang. Narasi sejarah tentang perempuan pada masa-masa perkembangan Islam juga lebih banyak dilihat dari sudut pandang puncak kekuasaan atau perempuan kalangan atas. Padahal dari sisi manapun perempuan berada dalam dinamika sebuah masyarakat, ketika Islam masuk dan berkembang misalnya, perempuan memiliki keterlibatan yang penting dengan caranya masing-masing.

Pergeseran Posisi Perempuan dalam Kekuasaan di Wilayah Pinggiran

Jauh sebelum Islam berkembang di Jawa, sejarah kita mencatat beberapa ratu sebelum masa Islam, yaitu masa Mataram Kuno hingga Majapahit. Ratu Shima berkuasa di Kalingga tahun 474-532 M. Selanjutnya Sri Pramowardhani memerintah Kerajaan Medang pada tahun 838-855 M sebagai putri Wangsa Syailendra. Dalam beberapa literatur, Medang disebut sebagai Mataram Hindu atau Mataram kuno (Adji, 2013). Selanjutnya, Ratu Sri Isyanatunggawijaya berkuasa tahun 947 M ketika masa kekuasaan Mataram kuno. Pada masa Majapahit, terdapat Ratu Tribhuwana Wijayatunga Dewi yang berkuasa tahun 1328 -1350 M. Kerajaan Majapahit juga memiliki Ratu Suhita yang lebih dikenal sebagai Ratu Kencana Wungu yang berkuasa tahun 1429-1447 M.

Ketika Ken Arok menjadi Raja Singhasari (1222-1227 M), masyarakat Jawa tentu mengenal sosok Ken Dedes. Keberadaannya selalu diidentikkan dengan kecantikan seorang permaisuri yang direbut Ken Arok dari penguasa terdahulu yaitu Tunggal Ametung. Padahal sosok Ken Dedes tidak bisa dipisahkan kekuatannya dari sisi keagamaan Hindu dan kebudayaan. Studi Bianca J Smith & Woodmark (2016: 317-332) menunjukkan bahwa Ken Dedes adalah seorang perempuan spiritualis, di samping Kanjeng Roro Kidul. Kosmologi masyarakat Jawa secara luas menempatkan Kanjeng Roro Kidul sebagai Ratu Laut Selatan (Samudra Hindia). Ken Dedes juga direpresentasikan sebagai *ardhanariswari*, yaitu perwujudan dari keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, dan siapa yang menikahinya akan meraih kekuasaan menjadi raja. Oleh karena itu, Ken Dedes dipercaya sebagai perempuan yang menurunkan raja-raja di Jawa Timur, Singhasari dan Majapahit. Dalam konteks demikian, Andaya (2016:1) menunjukkan bahwa Ken Dedes adalah "*the princess of the flaming womb*". Ia dihormati laksana dewa dalam kepercayaan kosmologi Jawa.

Narasi terhadap kedudukan perempuan pada masa sebelum Islam sama dengan narasi sejarah tentang perempuan pada masa Islam, yaitu lebih menepungkan perempuan di pusat kekuasaan kerajaan-kerajaan besar. Pada masa Hindu-Budha, perempuan juga pernah menempati kedudukan yang penting namun tampaknya kurang menjadi pengetahuan publik. Banyak kisah

sejarah hanya memberi legitimasi pada pusat kekuasaan dan pada saat itu perempuan yang terlihat oleh publik hanyalah perempuan kalangan atas dan itupun narasi sejarahnya tidak dominan. Kondisi lebih gelap tertuju pada kesenyapan perempuan-perempuan dalam sejarah wilayah pinggiran, bukan pusat kekuasaan. Sejarah begitu tidak memberi ruang bagi keberadaan tokoh perempuan di tingkat lokal atau pinggiran.

Penulis ingin memberi contoh tentang salah satu tokoh perempuan lokal yang sesungguhnya menjadi figur utama pada masa lalu. Masa itu, Islam belum berkembang di tanah Jawa atau masih masa agama Hindu Budha. Dalam hal ini penulis mengambil contoh perempuan penguasa di tingkat lokal, yaitu di wilayah Bagelen (Kabupaten Purworejo dan Kebumen sekarang) yang dikenal sebagai Nyai Bagelen (Marwah, 2018). Skema tentang masyarakat Bagelen mengacu pada skema Koentjaraningrat (1984) yang membagi variasi kebudayaan Jawa, di mana Bagelen menjadi salah satu variasi budaya Jawa pinggiran.

Sejauh ini sumber sejarah tentang Nyai Bagelen bukan merupakan prasasti atau babad, namun bersumber pada cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nyai Bagelen adalah nenek moyang masyarakat Bagelen di Jawa Tengah barat daya, yang digambarkan sebagai seorang petani yang ulet. Selain bertani, dia juga beternak dan menenun, sambil mengurus pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah ditinggalkannya. Nyai Bagelen juga digambarkan sebagai perempuan yang memiliki pendirian yang kuat dan memiliki jiwa kepemimpinan. Nyai Bagelen berkuasa menggantikan posisi suaminya sebagai pemimpin di wilayah Bagelen. Diperkirakan Nyai Bagelen memimpin wilayah Bagelen di bawah kekuasaan Kerajaan Medang (Mataram Kuno).

Sayangnya ketokohan Nyai Bagelen direduksi pada persoalan bias gender. Masyarakat Kabupaten Purworejo mengenal figur tersebut hanya sebagai sosok yang keramat dan didatangi pekuburannya untuk meminta berkah. Bahwa Nyai Bagelen adalah figur perempuan pemimpin yang hebat pada masa lalu tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas sebagai pengetahuan lokal yang menginspirasi atau menjadi basis identitas lokal tentang figur perempuan yang ideal. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Irwan Abdullah (2018), bahwa ketika masyarakat menjadi sumber pengetahuan maka pengetahuan yang terus-menerus direproduksi juga akan berhadapan dengan ideologi yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan, sehingga kebesaran tokoh perempuan bisa lekang oleh waktu karena bias gender tersebut. Akibatnya, semakin lama keterlibatan perempuan semakin tergerus dan tidak diketahui oleh khalayak luas.

Kini keberadaan figur Nyai Bagelen lebih banyak disimbolisasi dengan hal-hal yang bersifat mitos sehingga keutamaan-keutamaan yang ada dalam diri tokoh perempuan tersebut tidak tampak. Kapasitas Nyai Bagelen sebagai pemimpin lokal yang mampu mengelola sawah pertanian, beternak, dan memiliki kemampuan menenun, tidak banyak dipahami oleh khalayak. Demikian pula keberadaan Nyai Bagelen yang memiliki sifat tegas dan mampu mempertahankan pendapat atas suatu kebenaran; ingatan publik terhadap hal tersebut banyak mengalami keterputusan sejarah. Sangat penting seharusnya menampilkan sosok tokoh perempuan lokal tersebut sebagai perempuan pemimpin yang juga mampu mengurus bidang pertanian, peternakan, dan industri tenun, yang dapat menginspirasi banyak masyarakat lokal saat ini.

Dalam konteks demikian, ketokohan perempuan lokal sudah selayaknya menjadi basis identitas perempuan setempat.

Sebenarnya di banyak tempat lain, masih banyak kontribusi perempuan dalam menjaga agama dan tradisi mereka, tapi sangat jarang tercatat dan diakui oleh khalayak luas. Studi Marwah (2015) menunjukkan bahwa di wilayah pinggiran lainnya, yaitu di Kabupaten Banyumas, perempuan menjadi bagian yang sama pentingnya dengan laki-laki untuk menjaga tradisi Islam kejawaan masyarakat Bonokeling. Dalam ritual Bonokeling, mereka melakukan upacara tradisional ditambah dengan doa-doa Islami secara sepotong-potong. Kaum perempuan menjadi bagian dari pelaku upacara yang disebut *unggah-unggahan*, dengan membawa makanan yang berupa beras, lauk pauk dan jajanan. Mereka juga membuat kain tradisional yaitu kain *lawon* untuk menutup jenazah. Demikian pula di masyarakat Kalisalak yang memiliki tradisi *jaman jimat*, *sujarahen*, dan *rasullan*. Selain perempuan menjadi bagian dari pelaku tradisi tersebut, perempuan juga memiliki peran dalam pelaksanaan tradisi *gubrak lesung* dan *rengkong* yang merupakan sistem penyimpanan gabah. Di bagian pedesaan lainnya di Kabupaten Banyumas, terdapat pula kelompok masyarakat yang tinggal di Cikakak dan dikenal sebagai penganut *Islam Aboge (Islam Alip Rebo Wage)*. Mereka memiliki tradisi *jaroh rojab* dengan mengganti pagar keliling Masjid Saka Tunggal. Selain itu terdapat tradisi berupa *grebeg tumpeng rajaban* dan *ritual apitan*. Kaum perempuan memiliki peran penting sama dengan laki-laki, yaitu sebagai pelaku upacara maupun memasak makanan untuk makan bersama dalam upacara.

Adapun pusat penyebaran Islam pertama di Banyumas tercantum dalam *Babad Pasirluhur*. Narasi yang dimunculkan dalam perkembangan Islam tersebut didominasi oleh kaum laki-laki sebagai tokoh utama penyebaran Islam. Mereka adalah para utusan dari Kerajaan Demak. Saat itu Banyumas yang dimaksudkan berupa Kadipaten Pasirluhur. Tokoh-tokoh laki-laki sebagai penyebar Islam yaitu Syeh Makdum Ali, Syeh Makdum Umar, Banyak Belanak, dan Banyak Geleh. Syeh Makdum Ali dan Syeh Makdum Umar adalah utusan dari Kerajaan Demak, sedangkan Banyak Belanak dan Banyak Geleh adalah Adipati dan Patih Pasirluhur pada masa itu (Sugeng Priyadi, 2008). Perlu penggalian untuk melihat tidak adanya narasi tentang keterlibatan perempuan dalam menyebarkan Islam ketika itu. Sampai saat ini masyarakat Banyumas hanya mengenai para tokoh laki-laki tersebut yang mengembangkan Islam di Banyumas. Padahal studi dari Sugeng Priyadi juga menyebutkan bahwa ketika itu beberapa perempuan menjadi kepala desa (*demang*) di lingkungan Pasirluhur, seperti Demang Saratiman, Demang Nur Hakim, Demang Maryam.

I. Penutup

Peminggiran perempuan dalam narasi sejarah berkaitan dengan siapa yang memproduksi pengetahuan secara luas. Ketika ranah perkembangan Islam di nusantara berputar di istana, maka kedudukan dan kontribusi perempuan cenderung belum banyak diketahui apalagi diakui oleh publik. Hal itu disebabkan cara pandang yang dikembangkan lebih menyoal siapa yang memegang pucuk kekuasaan, sehingga yang terlihat hanyalah mereka yang menduduki

posisi puncak. Adapun narasi sejarah yang mengetengahkan di luar lingkaran kekuasaan dianggap tidak penting untuk dihadirkan.

Cara pandang yang demikian kemudian bersanding dengan ideologi yang senantiasa menganggap bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Ideologi yang demikian pada saatnya akan mengikis habis bentuk apapun yang sesungguhnya merupakan kontribusi perempuan untuk masyarakat dan untuk bangsanya. Bahkan ketika perempuan menjadi pucuk kekuasaan pun, keberadaannya tidak banyak menjadi sumber legitimasi sejarah. Padahal umumnya sejarah diproduksi oleh penguasa. Namun ketika penguasa itu adalah perempuan, seperti sulit bagi perempuan untuk menorehkan sejarah tentang kontribusi yang mereka curahkan.

Penguasa perempuan rata-rata direduksi menjadi figur utama yang dilihat dan dikenang karena kecantikannya, karena balas dendamnya, atau justru dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Masih jarang narasi sejarah yang mengakui kontribusi perempuan tidak hanya sebagai tokoh perempuan yang merujuk pada nama-nama putri kerajaan atau putri ulama yang menikah dan melahirkan tokoh besar dalam perkembangan masyarakat. Padahal perempuan juga bisa menjadi penjunjung tinggi agamanya, bersamaan dengan perannya untuk menjaga tradisi dan kebudayaannya.

Narasi sejarah tentang perempuan di wilayah pinggiran atau bukan pusat-pusat kekuasaan lebih gelap lagi. Baik sebelum masa Islam berkembang maupun setelah perkembangan Islam di nusantara, situasi demikian relatif sama. Seharusnya siapapun bisa dan memungkinkan untuk memproduksi dan memiliki pengetahuan, sebelum Islam masuk atau setelah Islam berkembang, baik oleh mereka yang berkuasa ataupun mereka rakyat di wilayah pinggiran. Saat ini keterlibatan dan kontribusi perempuan di wilayah pinggiran tidak pernah diakui dalam sejarah sebagai pihak yang ikut berkontribusi dalam menjaga agama dan tatanan adat istiadat yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Khrisna Bayu. 2013. *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Andaya, W.B. 2006. *The Flaming Womb*. Hawai'i: University of Hawai'i Press.
- Ahyat & Bahaudin. 2016. "Studi Ratu Kalinyamat ke Portugal Disiapkan" <http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/studi-ratu-kalinyamat-ke-portugal-disiapkan> (diakses 21 Oktober 2018).
- Banu, Sher AL. Khan. 2017. *Sovereign Women in A Muslim Kingdom, The Sultanah of Aceh 1641-1699*, Singapore : National University of Singapore Press.
- Carey, Peter & Hoube. Vincent. 2016. *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*, Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kumar, Ann. 2008. *Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad Ke-18*, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Marwah, Sofa, Widyastuti, Tri Rini. 2015. "Representasi Sejarah dan Tradisi Kuno Banyumas: antara Peran Perempuan dan Pelestarian Adat oleh Negara," *Jurnal Terakreditasi Nasional Paramita Unnes Semarang* Vol 1 No.25 Januari.
- Marwah, Sofa. 2016. *Perempuan dalam Tradisi Kekuasaan Islam di Banyumas*. Purwokerto : Unsoed Press.
- Marwah, Sofa, Lestari, Soetji, Widyastuti, Tri Rini. 2018. *Konstruksi Posisi Perempuan dalam Masyarakat Bagelen: Sudut Pandang Budaya, Agama, dan Politik*, Laporan Hasil Penelitian Berbasis Kompetensi, DRPM Kemenristekditi.
- Pramoedya Ananta, Toer. 2002. *Arus Balik*. Jakarta : Hasta Mitra.
- Priyadi, Sugeng. 2008. "Babad Pasir, Islamisasi, dan Perdikan Pasir," dalam *Tajdid Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam dan Kebudayaan*, Oktober.
- Smith, B.J. & Woodmark, M. 2016. "Magico-Spiritual Power, Female Sexuality, and Ritual Sex in Muslim Java: Unveiling the Kasekten of Magical Women". *The Australian Journal of Anthropology* 27 (3): 317-332.
- Vreede-De Stuers, Cora. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Wawancara dengan Prof. Dr. Irwan Abdullah, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2018.*
- Wintala, S, 2016. *Politik dalam Sejarah Kerajaan Jawa*. Yogyakarta: Araska.